



VOLUME XIII / NO. 132 / SEPTEMBER 2018

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL



MENGUAS ULANG REGULASI USANG

Pemerintah membuat aturan baru terkait pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Pembenaan dilakukan pada tata kelola, kewenangan, hingga sanksi agar lebih transparan dan akuntabel. Sudah saatnya PNBPN berdaya optimal dalam menyokong pendapatan di APBN.

Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 15 Regulasi Optimalkan Potensi
- 18 Infografis
- 20 Memperbaiki Aturan, Meningkatkan Pelayanan
- 23 Optimasi PNBP di Kepolisian
- 25 UU Baru, Harapan Baru

WAWANCARA

- 27 Seni Rupa Untuk Diplomasi Budaya

POTRET KANTOR

- 30 Pengawal Transformasi Digital Kementerian Keuangan

FIGUR

- 32 Pesan Orang Tua Untuk Terang Dunia

EKONOMI TERKINI

- 36 Ketahanan Ekonomi Diuji

KOLOM EKONOMI

- 40 Krisis Turki, Dinamika Global dan Kewaspadaan Kita

GENERASI EMAS

- 44 Tekun Merealisasi Mimpi

OPINI

- 46 Utang Bukanlah Momok

REGULASI

- 48 Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral, Penerimaan Negara Akan Meningkat

INSPIRASI

- 50 Berbagi Manfaat Lewat Kopi Nikmat

RENUNGAN

- 52 Mabuk Gawai

BUKU

- 53 Digital ParenThink

JALAN-JALAN

- 54 Terpikat Pesona Teluk Buyat

SELEBRITI

- 56 Surya Putra Sahetapy, Mengenalkan Bahasa Isyarat

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

“MOBIL MURAH!
STOK TERBATAS, TRANSFER KE REKENING SAYA”

Jangan sampai tertipu!

Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening bendahara, bukan atas nama pribadi • Tidak ada down payment atau DP untuk pembelian lelang • Apabila menemukan selebaran atau penawaran melalui telepon yang mencurigakan, segera hubungi call center DJKN atau KPKNL terdekat.

Informasi & kontak resmi layanan DJKN

 1500991

situs | www.djkn.kemenkeu.go.id

Dari Lapangan Banteng

UU PNBP Diperbarui

Mulai dari layanan pembuatan SIM dengan tarif ratusan ribu rupiah sampai penyewaan ruang gedung pemerintah dengan tarif puluhan juta adalah contoh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima negara. Contoh PNBP lainnya adalah penerimaan deviden BUMN, penerimaan dari kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik atas jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Pada 2017, pendapatan negara yang diterima melalui PNBP mencapai Rp311,2 triliun dari target Rp260,2 triliun, atau mencapai 119,59 persen. Meningkatnya PNBP tahun 2017 ini selaras dengan naiknya harga minyak mentah dunia. Royalti dari sektor minyak, gas, batubara, dan tambang lainnya juga termasuk PNBP yang memberikan kontribusi terbesar.

PNBP telah memberikan banyak pendapatan negara, namun pemerintah memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaannya. Permasalahan tersebut diantaranya karena masih ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, PNBP yang terlambat/tidak disetor

ke kas negara, maupun penggunaan langsung PNBP yang dilakukan diluar mekanisme APBN.

Sejak tahun 2011, telah dilakukan inisiatif perubahan UU 20/1997 mengenai PNBP dengan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). Penyusunan NA dan RUU dilakukan dengan melalui tahap diskusi-diskusi dan telah mendapat masukan dari Kementerian/Lembaga, akademisi, praktisi, serta uji publik dan FGD kepada masyarakat dan pelaku usaha di beberapa daerah.

Secara resmi rancangan amandemen (perubahan) atas UU PNBPN 20/1997 telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Ketua DPR melalui Surat Nomor: R-42/Pres/06/2015 tanggal 23 Juni 2015. Setelah lama tidak ada pembahasan, maka mulai awal 2018, pemerintah dan Komisi XI DPR secara intensif membahas revisi UU PNBPN yang sudah berlaku sejak tahun 1997 tersebut. Akhirnya, pembahasan dapat diselesaikan pada akhir bulan Juli 2018.

Dalam pidato pendapat akhir Menteri Keuangan di hadapan peserta rapat paripurna DPR RI, dikatakan bahwa UU PNBPN yang baru diharapkan mampu

mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBPN saat ini. Selain itu, diharapkan juga dapat mengantisipasi tantangan di masa depan sehingga penerimaan negara yang berasal dari PNBPN dapat optimal dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Yang menarik, dalam UU PNBPN yang baru ini, terdapat penerapan tarif nol rupiah/nol persen yang ditujukan untuk beberapa pertimbangan dan kondisi tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain untuk penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar. Selain itu juga ada pertimbangan bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil dari PNBPN dikembalikan pada masyarakat untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan transparan, serta dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan. Selamat datang UU PNBPN yang baru!

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
[@kemenkeuRI](http://kemenkeuRI)

Sampaikan harapanmu terhadap proses pemungutan PNBPN di daerahmu!
#OpiniAnda #MediaKeuangan

[@Vinka_AHB](https://twitter.com/Vinka_AHB) (Vinka A Hasta Barata)

Saya harap pemungutan PNBPN memenuhi ekspektasi. Memang mengejar target optimalisasi, tetapi jangan lupa terapkan transparansi. Seperti filosofi PNBPN sendiri, semoga benar-benar dapat memakmurkan rakyat dan meningkatkan kualitas layanan di negeri ini.

[@zamjaddid](https://twitter.com/zamjaddid) (Azzam Mujaddid)

Dengan adanya proses pemungutan PNBPN, kami berharap pada peningkatan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terutama pada wilayah kepengurusan dokumen dokumen administratif, teduh jika petugas memberikan senyum dan pelayanan terbaiknya

[@putuiu](https://twitter.com/putuiu) (tini gini titi)

Harapan sy agar tarif pungutan didasarkan atas dasar keadilan lalu ditetapkan dan disosialisasikan agar tdk terjadi pungli, pengelolaan & pelaporan dilaksanakan dgn sejelas-jelasnya agar #UangKita dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.





Konferensi Pers RAPBN 2019

Konferensi pers Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 dihadiri oleh sepertiga Menteri Kabinet Kerja pada Kamis (16/8/2018). Konferensi pers kali ini terasa berbeda karena berlangsung di media center Jakarta Convention Center (JCC). Dimana pada tahun-tahun sebelumnya konferensi pers dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal ini dilakukan lantaran untuk meramaikan kegiatan Asian Games 2018 yang berlangsung di Tanah Air.

Foto
Anas Nur
huda

Gunung Favorit Para Pendaki

Siapa yang tak kenal Gunung Rinjani? gunung yang tersohor sebagai salah satu gunung yang tercantik di Asia. Gunung Rinjani memang salah satu pilihan favorit bagi para pendaki, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita akan disugahi pemandangan yang indah mulai dari hijaunya padang rumput sampai eloknya Danau Segara Anak. Untuk mencapai puncak Rinjani tentu tidaklah mudah, pendaki harus melewati medan pasir bebatuan nan terjal serta trek yang panjang. Namun rasa lelah akan terbayar lunas oleh keindahan Gunung Rinjani yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.

Foto dan teks
Andi
Abdurrochim



16/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Perbaiki Investasi dan Pembangunan SDM jadi fokus RAPBN 2019

Presiden Jokowi menyampaikan Pidato Kenegaraan mengenai Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang RAPBN 2019 pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (16/08). Perbaikan Investasi untuk menggenjot penerimaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) jadi fokus RAPBN 2019. Ia menyatakan bahwa iklim investasi harus terus diperbaiki agar efisien dan terukur melalui deregulasi, debirokratisasi, dan simplifikasi.

Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong berkembangnya industri, khususnya industri skala kecil dan menengah di bidang manufaktur, konstruksi serta industri jasa termasuk industri berbasis digital.

“Tahun 2019, Pemerintah terus meningkatkan bantuan kepada UMKM dan Koperasi melalui subsidi KUR yang akan mencapai Rp12,2 triliun dan dana bergulir bagi usaha ultra mikro sebesar Rp3 triliun,” ujarnya di hadapan para anggota Dewan. Presiden Jokowi juga menyebutkan untuk tahun depan Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin. Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH) melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Diharapkan, melalui berbagai program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan pada tahun 2019 akan

turun lagi ke 8,5 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke 71,98. Selain itu, Pemerintah akan memperkuat layanan kesehatan kepada masyarakat, diantaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas pada 48 rumah sakit/balai kesehatan serta penguatan program penurunan angka *stunting* yang terintegrasi di 160 Kabupaten/Kota.

Perbaikan struktural terus dipacu dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkokoh daya saing bangsa, memperkokoh ketahanan ekonomi, dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi pun terus dilakukan agar aparaturnya makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya. “Pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparaturnya, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” tambahnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Media Center Jakarta Convention Center (JCC) menjelaskan pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan masih menghadapi risiko eksternal sehingga dipatok angka pertumbuhan 5,3persen. “Dengan adanya resiko tereskalasi, pertumbuhan 2019 yang kita jadikan dasar atau basis perhitungan APBN 2019 adalah 5,3,” kata Menkeu.

26/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Pengesahan RUU P2 APBN 2017 Menjadi UU Oleh DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (RUU P2 APBN 2017) menjadi Undang-Undang. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-32 DPR dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Komplek MPR-DPR, Jakarta, Kamis (26/07). Dari sisi Pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa kinerja Pemerintah seperti tercermin dari beberapa indikator dalam APBN 2017, merupakan pencapaian terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. “Di tengah kondisi perekonomian global yang masih dalam tahap pemulihan, kinerja realisasi APBN tahun anggaran 2017 masih mampu mencatat capaian yang cukup menggembirakan,” kata Menkeu.



28/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Dukung Asian Games 2018, Kemenkeu Gelar Fun Run

Kemenkeu Runner siap mendukung dan menyukseskan Asian Games 2018. Sebanyak 130 peserta yang terdiri dari seluruh komunitas lari di Unit eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat dalam acara Fun Run, di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada Sabtu (28/07). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan kepada segenap peserta agar fokus dalam menjalankan apapun supaya mencapai tujuan. Selain itu, Menkeu juga berpesan bahwa olah raga membawa sikap dan pikiran yang positif sehingga tidak sempat untuk berpikir negatif. “Jaga semangat terus dan terus memiliki sikap positif. Saya percaya itu. Anda berolah raga, Anda tidak pernah punya waktu untuk berfikir negatif, karena yang anda pikirkan adalah nafas saya, badan saya, dan bagaimana kita bisa *embrace life in a positif thinking*,” ujarnya.

31/07

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Technology Disruption Jadi Tantangan Regulator Audit

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo memberikan sambutan pada acara 2018 ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Inspection Workshop dan the 8th AARG Meeting with The Audit Firms yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (31/07). Wamenkeu menjelaskan salah satu tantangan yang dihadapi oleh regulator audit saat ini adalah gangguan teknologi (*technology disruption*). Kecerdasan buatan, *blockchain* dan *cryptocurrency*, mekanisme *peer-to-peer*, serta *big data* hanyalah beberapa contoh masalah yang dihadapi saat ini. “Cara-cara baru dalam melakukan bisnis menjadi tantangan termasuk untuk profesi audit. Akuntan Publik dan perusahaan audit sangat menyadari tantangan ini dan mereka telah mulai merangkul dunia baru ini,” ujar Wamenkeu.



02/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Kesetaraan Gender Jadi Isu Global dan Prioritas Nasional

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynote speech pada Seminar Women's Participation for Economic Inclusiveness yang membahas kesetaraan gender merupakan isu global dan juga menjadi isu prioritas nasional di Hotel Sheraton Surabaya (02/08). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Voyage To Indonesia menjelang Annual Meetings IMF-WBG Oktober 2018 di Bali. Di Indonesia, kesempatan bersekolah bagi anak perempuan dan laki-laki sudah hampir setara. Namun demikian, ketika memasuki dunia kerja terjadi penurunan hingga 50 persen bagi perempuan. Peran perempuan sebagai ibu dan istri menjadi hambatan dalam meneruskan karirnya. "Bank Dunia memperkirakan bahwa kesenjangan gender menyebabkan hilangnya pendapatan rata-rata 15 persen di negara-negara anggota OECD, 40 persen diantaranya disebabkan oleh *entrepreneurship gaps*," ungkap Menkeu.

Menkeu Mendapat Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu menteri di Kabinet Kerja dan Kepala Lembaga Negara yang mendapatkan anugerah Bintang Bhayangkara Utama. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diberikan Presiden atas usulan Kapolri. Penyerahan penganugerahan dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Auditorium PTIK, Jakarta pada Selasa (07/08). Mereka yang menerima penghargaan tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono. Kepala Badan Intelijen Negara (Kepala BIN) Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna.



07/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

08/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Menkeu Nyalakan Api Obor Asian Games 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyalakan obor api (torch relay) Asian Games 2018 di Bandar Lampung pada Rabu (08/08) untuk memeriahkan acara menjelang perhelatan akbar tersebut. Ratusan warga Bandar Lampung berkumpul di kawasan Fly Over Jl. Z.A Pagar Alam hingga Jl. Teuku Umar untuk menyambut kirab obor Asian Games. Menkeu berpesan kepada seluruh atlet Asian Games 2018 untuk menjaga semangat dan percaya diri demi nama baik Indonesia. Menkeu menyampaikan bahwa Asian Games 2018 adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia layak dan pantas menjadi tuan rumah event olahraga terbesar di Asia tersebut. "Saya turut mendukung seluruh atlet cabang olah raga apapun agar bisa memberikan yang terbaik dalam ajang 4 tahunan ini," ujarnya.



10/08

Teks
Biro KLI
Foto
Biro KLI

Bea dan Cukai Kembali Musnahkan Hasil Tangkapan

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan apresiasinya pada acara Pemusnahan Barang Milik Negara Hasil Tangkapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung Periode Tahun 2018 di Kanwil DJBC Bandar Lampung pada Jum'at (10/08). Wamenkeu menyampaikan ucapan terima kasihnya atas peran serta masyarakat yang aktif mendukung pelaksanaan tugas DJBC khususnya kepada seluruh jajaran TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah serta seluruh instansi terkait lainnya di wilayah Lampung. "Pada hari ini, kami senang sekali terhadap *effort* kita untuk bisa lebih baik, bukan masalah seremonialnya. Karena Bea Cukai kedepannya tidak semata-mata menjadi cari upaya pendapatan, tetapi bagaimana bisa menjadi *trade facilitator*, bisa mengatur perdagangan yang legal, mempercepat memberikan fasilitas baik ekspor maupun impor," paparnya.

14/08

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Ministry of Finance Human Capital Summit and Expo 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka acara Ministry of Finance Human Capital Summit and Expo 2018 di gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (14/08). Menkeu menekankan pentingnya Pengelola Sumber Daya Manusia (HR Managers) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk open-minded, melayani, dan mampu menyelaraskan potensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. "Bagaimana cara kita menempatkan orang. Bagaimana kita harus memperhatikan staf kita yang ditugasi di suatu tempat atau di satu fungsi. *What kind of attention dan assignment* yang harus kita berikan. Sehingga mereka merasa *we are part of* Kementerian Keuangan dan kita adalah bagian Kementerian Keuangan, bagian dari Republik Indonesia," kata Menkeu menegaskan pentingnya memahami pegawai sebagai manusia.



REGULASI OPTIMALKAN POTENSI

Seruan kata setuju terdengar bersahutan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI siang itu. Para anggota dewan mengamini pengesahan Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) Tahun 2018. UU ini nantinya menggantikan UU PNBP Tahun 1997 yang dinilai telah usang dan telah berlaku selama 21 tahun. Dengan disahkannya UU PNBP ini, perbaikan pada tata kelola dan optimasi PNBP sudah di depan mata.

Selama sepuluh tahun terakhir, peran PNBP dalam menopang penerimaan negara cukup signifikan. Tidak kurang dari 25 persen penerimaan negara dalam pos APBN bersumber dari PNBP. Itu sebabnya pemerintah berinisiatif merevisi UU PNBP agar ke depan, pengelolaan PNBP bisa lebih transparan dan akuntabel. Harapannya, potensi PNBP bisa diperoleh secara lebih optimal, namun tetap memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Pokok Penyempurnaan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada Juli, menyampaikan terdapat sedikitnya lima pokok penyempurnaan dalam UU PNBP yang baru. Pertama, terkait pengelompokan objek PNBP menjadi enam klaster, yaitu pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND), pengelolaan barang milik negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sektor minerba merupakan salah satu potensi PNBP terbesar.

Foto
Resha Aditya Pratama.

Kedua, pengaturan tarif PNBPN dilakukan dengan memperhatikan dampaknya bagi masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, sosial budaya, serta aspek keadilan. Selain itu, UU ini juga memberikan penguatan landasan hukum terkait kebijakan pengenaan tarif hingga nol rupiah atau nol persen, serta dimungkinkannya penetapan tarif melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bagi PNBPN yang bersifat dinamis.

Ketiga, penyempurnaan tata kelola PNBPN mengenai kewajiban instansi pengelola dalam melakukan verifikasi dan pengelolaan piutang, serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan dan efisiensi. Keempat, keterlibatan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) guna penguatan fungsi pengawasan untuk menekan jumlah pelanggaran. Kelima, pemberian keringanan berupa opsi penundaan, pengangsuran, pengurangan, dan pembebasan akibat kondisi tertentu, baik karena keadaan kahar, kesulitan likuiditas, maupun kebijakan pemerintah.

Memahami Filosofi

Jauh sebelum 1997, Indonesia belum memiliki landasan hukum dalam pengelolaan penerimaan negara yang bukan dari pajak. Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyampaikan filosofi dibuatnya UU yang mengatur pengelolaan PNBPN, yaitu UU PNBPN No.20 Tahun 1997.

“Sebelum (1997) itu sudah banyak pungutan di Kementerian/Lembaga (K/L) di luar pajak dan bea cukai, tapi tidak punya landasan hukumnya, sehingga ada ide dibuatlah Undang-Undang-nya dan (perlu) ada PP (Peraturan Pemerintah)-nya,”ungkap Askolani.

Lebih lanjut Askolani menyampaikan, disusunnya UU PNBPN membuat mekanisme pemungutan oleh K/L menjadi lebih jelas. “Kalau K/L mau memungut (PNBPN) dia harus mengusulkan pembuatan PP-nya. Kalau dulu *kan* tidak ada, suka-suka,”



Pemeliharaan GBK merupakan bentuk optimalisasi pemanfaatan BMN.

Foto Tino Adi Prabowo

jasasnya. PP yang diusulkan K/L tersebut, lanjutnya, diproses oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk difinalkan kemudian. Selanjutnya, apabila K/L ingin menggunakan penerimaan tersebut, perlu memperoleh izin penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perbaiki kekurangan

Seiring perjalanan waktu, saat terjadinya reformasi keuangan negara pada 2003, mulai ditemukan sejumlah kekurangan pada UU PNBPN 1997. Askolani menyebutkan, salah satu alasan dilakukannya perubahan UU PNBPN adalah karena ditemukannya ketidaksinkronan definisi PNBPN antara UU PNBPN 1997 dengan UU Keuangan Negara Tahun 2003.

“Jika mengikuti definisi UU PNBPN, hibah ini menjadi PNBPN. Tapi di UU No.17 Tahun 2003, hibah itu bukan PNBPN, dia komponen ketiga penerimaan,”jelas Askolani.

Dalam UU PNBPN 1997, yang dimaksud dengan PNBPN adalah seluruh penerimaan pusat selain penerimaan perpajakan. Padahal, UU Keuangan Negara menyatakan pendapatan negara terdiri dari penerimaan

perpajakan, PNBPN, dan hibah.

Hal lain yang juga menjadi kelemahan dari UU PNBPN sebelumnya adalah banyaknya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan PNBPN oleh K/L. “Temuan itu setiap tahun selalu muncul di banyak K/L dan jumlahnya signifikan, nilainya bisa sampai di atas Rp1 triliun,” katanya.

Temuan tersebut diantaranya pungutan yang dilakukan K/L tidak memiliki dasar hukum, atau dipungut tapi tidak sesuai dengan dasar hukum atau tarifnya. Selain itu, beberapa K/L diketahui menahan PNBPN dan tidak langsung menyetorkan PNBPN yang diterimanya. Beberapa K/L bahkan menggunakan PNBPN yang dipungutnya tanpa ada izin penggunaan dari Menteri Keuangan.

“Dia (K/L) pakai langsung uang (pungutan PNBPN) itu, padahal tidak punya dasar hukum (PMK), untuk menggunakan itu,”ungkapnya.

Belakangan, diketahui bahwa saat K/L melihat adanya potensi PNBPN, dia merasa keberatan untuk mengajukan PP atau merevisi PP yang ada sebagai dasar pungutan. Pasalnya, waktu yang diperlukan

dalam membuat atau merevisi PP memakan waktu yang lama.

“PP itu dari awal sampai ditetapkan bisa sampai 3-4 tahun, malah ada yang lebih dari 5 tahun. Inilah sebabnya kenapa K/L tadi lihat ada potensi, dia *nggak* sabar,” ungkap Askolani.

Kini DJA bersikap proaktif dalam mendukung penetapan PP agar bisa lebih cepat, baik proses revisi di K/L, Kemenkeu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet, maupun di Sekretariat Negara. Selain itu, UU PNBPN yang baru juga mengakomodasi penetapan tarif melalui PMK, terutama objek PNBPN yang bersifat dinamis.

“Di teknis harus selesai, punya target dua, tiga, empat bulan paling lama, sehingga kita yang sekarang proaktif dorong K/L. Namun, selain memperbaiki sistim, cara kerja dan sinergi, di UU revisi juga kita sebutkan bahwa penetapan tarif dimungkinkan dengan PMK, tidak harus pakai PP,”jelasnya.

Upaya konsistensi

Sebagai upaya konsistensi terhadap UU Keuangan Negara, UU PNBPN 2018 merevisi definisi PNBPN agar lebih sejalan. Terkait hal ini, Direktur PNBPN Ditjen Anggaran Mariatul Aini menyebutkan perbedaan definisi PNBPN. “Dulu pengertian PNBPN (menurut UU PNBPN 1997) adalah penerimaan Pemerintah Pusat selain penerimaan perpajakan. Namun sekarang (UU PNBPN 2018), definisinya menjadi lebih panjang, jelas, dan lengkap,” ungkapinya.

Aini melanjutkan, dalam UU PNBPN baru, disebutkan unsur subjek maupun objek PNBPN. “Subjeknya adalah perorangan dan badan. Sementara objeknya adalah pungutan terhadap sumber daya dan hak negara lainnya,” jelasnya.

Selain itu, di dalam definisi juga disebutkan bahwa PNBPN merupakan penerimaan pemerintah pusat, sedangkan wajib bayar yang dibebankan PNBPN bukan hanya pihak yang memperoleh manfaat langsung, tetapi juga yang memperoleh manfaat tidak langsung.

Perkuat kewenangan

UU PNBPN 2018 memperkuat kewenangan Kemenkeu dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBPN di K/L. “Saat ini pelaksanaan pengawasan dan verifikasi di institusi pengelola PNBPN di masing-masing K/L, masih perlu diperkuat. Itu makanya, peran Kemenkeu untuk bisa mendorong K/L melakukan tugasnya dengan baik,” terang Askolani.

Dia melanjutkan, selama ini pada praktiknya, setiap PNBPN yang bersifat *self assessment* tidak

diakukan verifikasi, terkait kebenaran jumlah setoran yang diakui wajib bayar.

“Maka di UU yang baru, kita sebutkan bahwa K/L harus verifikasi itu sehingga meyakini uang yang disetor oleh Wajib Bayar itu sesuai dengan yang diambil dan dikelola, kalau ada masalah, barulah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) turun tangan”jelas Askolani.

Dia melanjutkan, selama ini verifikasi oleh BPKP dilakukan dengan segala keterbatasan pada tenaga, waktu, dan anggaran. “Jadi dari 10 ribu Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diverifikasi sama BPKP itu hanya 60 IUP. Itupun diambil *sample*,”katanya.

Pada UU ini juga, Kemenkeu diberi kewenangan untuk me-*review* jenis dan tarif PNBPN. Hal ini juga disampaikan Direktur PNBPN Mariatul Aini. “Di dalam undang-undang ini Menteri Keuangan, secara jelas diatur, diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pengawasan dan verifikasi. Kuncinya adalah di pengawasan dan verifikasi, karena memang DPR menginginkan pengawasan ini bisa lebih diperkuat agar bisa lebih optimal khususnya untuk yang wajib bayar *self-assessment*,”jelas Aini.

Verifikasi dan pengawasan ini, diyakini Aini bisa mengoptimalkan potensi PNBPN yang belum tergali. “Masih banyak Wajib Bayar yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya. Masih banyak yang belum diyakini apakah memang PNBPN (yang seharusnya disetorkan) sebesar itu,”sebutnya.

Potensi PNBPN diharapkan juga bisa dioptimalkan pada BMN. Terlebih, besarnya BMN yang dimiliki negara belum sesuai dengan jumlah PNBPN hasil pemanfaatan BMN. Salah satu faktor yang menjadi penyebab diperkirakan karena keterbatasan dana dalam memelihara BMN, sehingga PNBPN dari pemanfaatan BMN tidak bisa dipergunakan kembali untuk memelihara atau menaikkan kualitas aset agar memiliki nilai lebih. “Sekarang dengan UU yang baru dari pemanfaatan BMN bisa digunakan,”jelas Aini.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan Direktorat PNBPN pada 2017, SDA masih menjadi penyumbang terbesar dalam pos PNBPN sebesar Rp152,5 triliun lebih. Selanjutnya, diikuti dengan PNBPN dari sektor layanan sebesar Rp63,8 triliun, serta sektor kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp45 triliun lebih.

Teks Farida Rosadi

MENDUKUNG PENERIMAAN NEGARA MELALUI UU PNBP

Revisi Undang-Undang PNBP telah disetujui parlemen dan pemerintah pada bulan Juli 2018 yang lalu. Kini, PNBP menjadi potensi sumber penerimaan negara selain pajak. Keluarnya UU PNBP menjadi bagian penting dari tujuan pemerintah yang ingin menertibkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri.

6 KLASTER OBJEK PNBP



Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;



Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara;



Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Pelayanan;



Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Pengelolaan Dana;

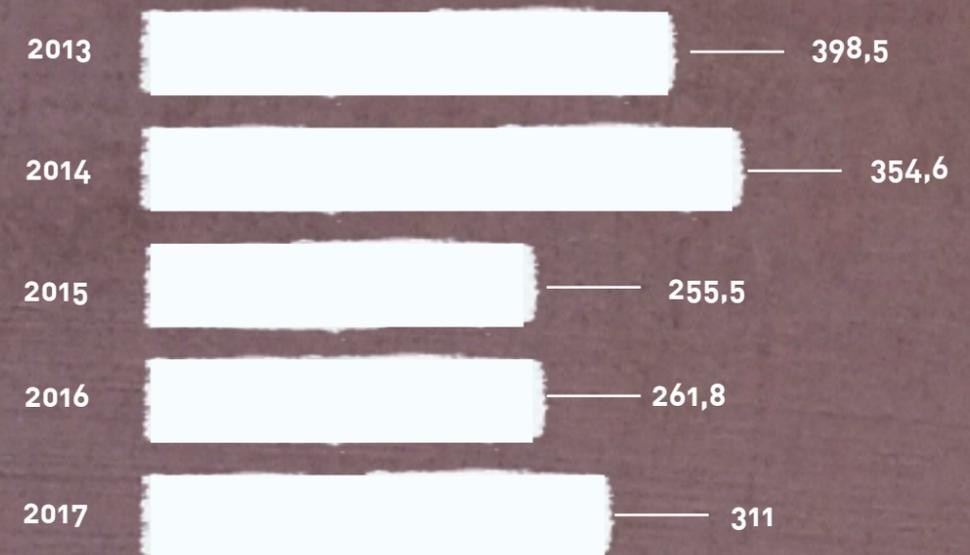


Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;



Kelompok Objek PNBP Untuk Bidang Hak Negara Lainnya.

PNBP PERIODE 2013 s.d. 2017 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

BENTUK TARIF PNBP



Tarif Spesifik. Tarif ini dalam bentuk nominal uang yang ditetapkan.



Tarif Ad Valorem. Tarif ini dalam bentuk persentase dan formula yang ditetapkan

PERUNTUKAN TARIF Rp0 ATAU 0%



Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan penanggulangan bencana atau keadaan kahar.



Kegiatan diselenggarakan untuk masyarakat yang tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran

MEMPERBAIKI ATURAN, MENINGKATKAN PELAYANAN

Dua puluh satu tahun bukan periode yang pendek. Berbagai latar belakang kebijakan muncul dalam rangka mendorong penggantian salah satu payung hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya adanya adanya reformasi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. Tanggal 26 Juli 2018 menjadi tonggak masuknya era baru pengelolaan PNBP. UU Nomor 20 Tahun 1997 pun sudah resmi tidak berlaku.

Dengan UU yang baru, diharapkan sumbangsih sektor PNBP terhadap penerimaan negara dapat menjadi lebih optimal. Di sisi lain, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan langsung yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Sumbangan sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun diharapkan menjadi maksimal. Lebih jauh, UU PNBP yang baru ini pun memberikan kepastian hukum untuk pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian dan kesinambungan untuk generasi mendatang.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, UU PNBP yang baru merupakan bentuk upaya penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. Secara filosofis, Menkeu juga menjelaskan bahwa PNBP berbeda dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

“Untuk memasukkan di dalam Undang-Undang, kita akan melihat filosofinya mungkin agak berbeda berdasarkan sumber dari penerimaan negara bukan pajak. Tidak sama seperti pajak yang mungkin satu homogen, yaitu kewajiban warga negara yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayarkan perpajakan, PNBP itu seluruh yang berhubungan dengan penerimaan yang bukan perpajakan,” urainya dalam rapat kerja Pemerintah dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, proses penggodokan RUU PNBP sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah sejak tahun 2010. Bahkan, RUU PNBP telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014. Pada periode yang sama, upaya pembahasan dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait pun telah

dilakukan. Akhirnya, tanggal 23 Juni 2015 pun RUU PNBP secara resmi disampaikan Pemerintah kepada DPR RI.

“Dalam perjalanan waktu itu yang tadinya sepenuhnya di-handle oleh Direktorat Jenderal Anggaran kemudian kami ditugaskan bersama-sama DJA mengawal RUU ini dan membahasnya bersama dengan DPR. Dengan perkuatan dari tim Biro Hukum Sekretariat Jenderal, pembahasan RUU semakin baik dan semakin cepat, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kami ditugaskan membantu DJA, RUU ini bisa diselesaikan,” jelas Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto, dalam wawancara dengan Media Keuangan.

Untuk melayani masyarakat

Dalam UU PNBP yang baru ini, Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, menjelaskan adanya kepastian hukum dalam pemberian tarif yang bisa sampai dengan 0 persen atau 0 rupiah. Misalnya saja, tarif pelayanan untuk siswa miskin atau orang miskin, atau tarif pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang saat ini tarifnya nol rupiah, sedangkan untuk pelayanan nikah di rumah sebesar Rp600 ribu.

“Undang-Undang yang baru, ini dibunyikan bahwa penarifan di PNBP dimungkinkan diberikan nol untuk fungsi pendidikan, kesehatan, sosial, atau untuk masyarakat miskin,” jelas Askolani.

Dengan demikian, PNBP dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga tidak hanya berfungsi untuk tujuan pemberian pelayanan publik, namun juga untuk membantu masyarakat miskin. Menambahkan hal tersebut, Direktur PNBP DJA, Mariatul Aini, menerangkan di dalam Undang-Undang yang baru



Pengurusan Paspor, SIM, dan STNK merupakan contoh dari PNBP.

Foto
Anas Nur Huda.

ini yang dimaksud pengenaan tarif sampai dengan nol persen merupakan batas bawah. Poin tersebut pada dasarnya sudah dilaksanakan saat ini, namun belum memiliki dasar hukum UU. Dengan UU baru ini, dasar hukumnya semakin kuat dan jelas.

Ia mencontohkan beberapa pelayanan publik institusi lain seperti uji penelitian atau tiket masuk museum bagi pelajar dapat dikenakan diskon tertentu. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan azas dalam menerapkan tarif PNBP yang juga mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat, dunia usaha, serta aspek keadilan.

Klasterisasi obyek PNBP

Selanjutnya, Aini juga menjelaskan klasterisasi yang

ditegaskan dalam UU PNBP yang baru. Sebelumnya, dalam UU Nomor 20 Tahun 1997, secara prinsip sudah ada, namun masih tidak secara jelas, sehingga perlu dipertegas dalam UU PNBP yang baru. Sekarang, untuk memberikan kepastian hukum, PNBP dibagi menjadi enam klaster. Yang pertama adalah layanan kepada masyarakat yang biasanya terkait dengan tugas dan fungsi pemerintahan. Contohnya seperti pelayanan imigrasi, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain.

Kemudian klaster berikutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. “Ini memang kita *stressing* di dalam PNBP terkait pemanfaatan sumber daya alam dan memang saat ini pun PNBP paling besar berasal dari sumber daya alam.

Apalagi dengan harga minyak yang sudah semakin baik, batubara juga semakin baik. Misalnya sumber daya migas, minerba, kemudian kehutanan, perikanan, panas bumi, dan lain-lain. Itu poin kita di sana,” jelas Aini.

Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa peran pemerintah dalam mengatur regulasi tarif menjadi penting agar sumber daya alam yang ada tidak hanya tereksplorasi tanpa memperhatikan kesinambungan untuk generasi mendatang. “Tapi juga perlu dilihat jangan sampai tarifnya juga membebani dunia usaha sehingga tidak menarik dunia usaha untuk investasi terutama dari luar negeri berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya.

Klaster yang ketiga adalah pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Klaster ini yang dahulu dikenal sebagai PNBP dari bagian pemerintah. Umumnya memang dari dividen BUMN. Beberapa obyek PNBP baru yang masuk dalam klaster ini adalah tambahan surplus Bank Indonesia. “Dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga memang sampai saat ini belum ada setoran tetapi kita sudah tampung karena kemungkinan juga bisa saja ada potensinya. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga



Undang-Undang yang baru, ini dibunyikan bahwa penarifan di PNBPN dimungkinkan diberikan nol untuk fungsi pendidikan, kesehatan, sosial, atau untuk masyarakat miskin,

Askolani
Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan

demikian. Jadi kita tampung. Selain dari BUMN juga dari badan-badan pemerintahan yang berpotensi ada PNBPN-nya,” jelasnya.

Berikutnya adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). PNBPN ini berasal dari aset-aset negara, gedung, atau ruangan yang bisa dimanfaatkan oleh publik untuk kegiatan tertentu. Saat ini, regulasi terkait hal tersebut merujuk kepada regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola aset negara.

Kemudian kelima adalah klaster pengelolaan dana. “Pengelolaan dana ini contohnya di BLU (Badan Layanan Umum) Kelapa Sawit, LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), BLU di Kementerian Koperasi. Beberapa BLU ini mengelola dana yang disalurkan ataupun yang di ambil dari masyarakat kemudian dikelolanya,” urainya.

Terakhir, PNBPN dari hak negara lainnya. Misalnya dari denda. “Begitu kena denda masuk ke sana ataupun hak-hak lainnya yang saat ini mungkin belum terlihat. Dengan Undang-Undang ini, ke depan bisa saja itu ada. Jadi, hal ini untuk memberikan payung regulasi. Itu menjadi hak negara lainnya. Itu terkait dengan klasternya yang merupakan hal yang baru,” ungkapnya.

Subyek baru

Dalam UU yang lama, pengaturan terkait subyek PNBPN tidak ada. Dengan UU baru, terdapat penegasan bahwa subyek PNBPN adalah badan ataupun perorangan. Kemudian adanya kewajiban melakukan verifikasi oleh institusi pengelola maupun mitra institusi pengelola. Selama ini kewajiban ini tidak ada aturannya tetapi sudah dilaksanakan. Dengan penegasan di dalam UU PNBPN yang baru, Kementerian/Lembaga Pengelola memiliki kewajiban untuk melaksanakannya.

“Kalau mereka tidak melaksanakan akan terkena sanksi. Nah ada sanksi ini diharapkan K/L bisa lebih serius untuk melaksanakan verifikasinya karena bentuk verifikasi ini kan sebagai hak negara untuk meyakini apakah memang yang dibayar oleh Wajib Bayar, terutama Wajib Bayar yang *self assessment*. *Self assesment* itu biasanya di badan-badan usaha yang mengelola sumber daya alam. Mereka menghitung sendiri dan mereka setorkan. Hal ini untuk menguji apakah kita yakin yang disetorkan sebesar itu, apakah kita yakin kualitasnya seperti itu, apakah kita yakin jatuhnya seperti itu. Makanya perlu ada verifikasi oleh Kementerian/Lembaga untuk meyakini nilainya,” terang Aini.

Kepatuhan wajib bayar

Apabila di pajak kita mengenal kepatuhan pajak (*tax compliance*), maka di PNBPN pun mengenal kepatuhan dari Wajib Bayar PNBPN. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), selama ini PNBPN memang hanya fokus dari sisi obyek, namun belum dilihat subyeknya siapa. Dengan adanya UU baru ini, definisi subyek menjadi hal yang penting. Di sisi lain, kepatuhan para Wajib Bayar pun perlu dikelola.

“Ada semacam *compliance management* yang mengklasifikasikan subyek PNBPN yang patuh dan tidak patuh. Lalu ada insentif juga bagi yang patuh, misalnya ia bisa memperoleh layanan lebih cepat,” jelasnya.

Untuk menghadapi berbagai tantangan pengelolaan PNBPN yang ada, Yustinus merekomendasikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, pemerintah perlu menyiapkan struktur organisasi pengelola PNBPN. Yang kedua adalah perlunya percepatan dan harmonisasi aturan pelaksanaan UU yang baru dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang kadang-kadang jaraknya terlalu jauh sehingga menimbulkan kekosongan hukum. “Secara *de jure* Kementerian/Lembaga sudah tidak boleh memungut lagi, misalnya, karena transisinya mungkin terlalu pendek ternyata PP dan PMK barunya belum siap. Ini juga jadi tantangan kita,” jelasnya.

Selanjutnya adalah sistem pengelolaan PNBPN. Menurutnya, sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan PNBPN. “Mau diambil darimana? Siapa saja? Kapan *training*-nya? Standarnya seperti apa? Itu juga harus dipikirkan,” jelasnya.

Terakhir adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu penting agar masyarakat lebih mengerti akan adanya aturan tersebut. “Kemarin yang ramai di publik seolah-olah pemerintah ini agresif mau memungut dari orang kawin dan orang mati juga mau dipungut. Padahal itu kan hanya mengintegrasikan peraturan yang sudah ada,” tuturnya.

Teks Abdul Aziz

OPTIMASI PNBPN DI KEPOLISIAN



Samsat corner sebagai salah satu contoh PNBPN di Kepolisian.

Foto
Resha Aditya Pratama

Tahun 2017 lalu Kepolisian RI (Polri) mendapat penghargaan PNBPN Award untuk kategori penerimaan di atas Rp1 triliun. Selain sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan PNBPN, pemberian penghargaan ini adalah salah satu upaya untuk mendorong perbaikan di Kementerian/Lembaga lain.

Dirjen Anggaran Askolani menjelaskan, ada beberapa aspek yang menjadi kriteria penilaian. Dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016 yang dilakukan BPK, Polri mendapat opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Artinya tidak terdapat temuan, termasuk dalam pengelolaan PNBPN.

Selain itu, Polri juga melaksanakan ketentuan PNBPN dengan baik. Misalnya, kepatuhan penyampaian laporan realisasi 3 bulanan dan penyampaian usulan target dan pagu dalam rangka penyusunan APBN. “Realisasi PNBPN Kepolisian RI juga terus mengalami pertumbuhan,” jelas Askolani.

Kepala Pusat Keuangan Polri, Brigjen Pol. Bambang Ghiri mengatakan saat ini Polri mengelola 17 tarif resmi untuk pelayanan masyarakat. Beberapa



"Transparansi itu tujuannya untuk pengawasan petugas dalam rangka menghindari pungli kepada masyarakat,"

**Brigjen Pol.
Bambang
Ghiri
Kepala Pusat
Keuangan
Polri**

contoh yang paling dikenal adalah tarif pembuatan SIM, STNK, pelatihan dasar untuk Satpam, ijin senjata api, serta pengawalan objek vital. Setelah disetor ke kas negara, Polri kemudian berhak menggunakan kembali 80 persen uang tersebut.

Dijelaskan Bambang lebih lanjut, dana PNBPN harus dikembalikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bambang mencontohkan, Polri membangun sarana dan prasarana penunjang seperti gerai pelayanan di mall dan SIM keliling.

Hasil PNBPN juga digunakan untuk membangun sistem online pembayaran PNBPN. Bukan hanya mempercepat layanan, pemanfaatan teknologi juga meningkatkan transparansi. "Transparansi itu tujuannya untuk pengawasan petugas dalam rangka menghindari pungli kepada masyarakat," ujar Bambang.

Di bidang pengawasan objek vital, dana PNBPN digunakan untuk meningkatkan mobilitas anggota Polri hingga ke daerah terpencil. Dengan begitu, fungsi kepolisian bisa lebih dirasakan masyarakat. "Saat ini penerbitan SKCK sudah bisa dilakukan secara online mulai tingkat Polsek sehingga lebih memudahkan masyarakat," tutur Bambang.

Bambang menceritakan, Polri masih menemui beberapa kesulitan dalam mengelola PNBPN. Pertama, ada perbedaan pendapat mengenai penempatan pos penerimaan yang melibatkan dua institusi. Contohnya, saat Kepolisian mengenakan denda tilang kepada pelanggar tata tertib lalu lintas, berkas tilang akan diserahkan ke kejaksaan untuk proses pengadilan dan menentukan besaran dendanya.

Uang denda kemudian disetorkan ke rekening kejaksaan. Akibatnya Polri tidak tahu berapa total pendapatan dari tilang, padahal mereka harus memenuhi target pendapatan. Selain itu, Polri juga membutuhkan dana tersebut untuk operasional seperti membeli bahan bakar dan mengganti biaya cetak blanko. Artinya, perlu ada harmonisasi antara Polri dan Kejaksaan. Apalagi tilang perlu dilakukan untuk menertibkan lalu lintas.

Kesulitan kedua, UU PNBPN yang lama

mensyaratkan agar penggunaan PNBPN dikembalikan dalam bentuk layanan kepada unit yang memberi layanan. Sementara, dalam memberi layanan unit tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Ada unit-unit lain yang mendukung dan juga membutuhkan dana operasional. "Jadi, kami berharap UU PNBPN yang baru memungkinkan subsidi silang seperti itu," kata Bambang.

Askolani mengakui, penggunaan dana PNBPN antar institusi dengan irisan tugas sempat menjadi perdebatan bertahun-tahun. Untuk tilang, pelanggar memiliki dua pilihan. Pertama, pelanggar bisa langsung mengakui kesalahannya dan membayar denda ke rekening Kepolisian. Kedua, pelanggar bisa mengikuti proses pengadilan. Jika terbukti bersalah, pengenaan dendanya akan disetorkan ke kejaksaan. Hasil PNBPN di pengadilan inilah yang selama ini tidak bisa digunakan oleh Polri.

Namun kini UU PNBPN yang baru sudah mengharmonisasikan hal-hal tersebut. Kalau kasusnya adalah tilang di jalan dan keputusan di pengadilan, maka PNBPN tersebut digantikan dengan anggaran rupiah murni untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan tilang.

Askolani menambahkan, UU baru juga sudah memungkinkan unit penunjang untuk menggunakan uang PNBPN. Tentunya dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, dan dipastikan digunakan untuk meningkatkan layanan. "Sebab kerja itu *kan* butuh sinergi antarunit, *nggak* bisa hanya satu unit pemberi layanan saja," jelas Askolani.

Askolani menegaskan, meski optimasi pendapatan menjadi salah satu tujuan UU PNBPN, namun tetap harus sejalan dengan tujuan lainnya. Pertama, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, perbaikan distribusi pendapatan, serta pelestarian lingkungan. Kedua, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan layanan masyarakat.

Teks Irma Kesuma



Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Keuangan
Hadiyanto.

Foto
Resha Aditya
Pratama

UU Baru, Harapan Baru

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBPN) menjadi angin segar bagi perbaikan tata kelola PNBPN, agar lebih akuntabel dan transparan. Terlebih lagi, UU ini memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat di samping peningkatan potensi bagi penerimaan negara. Simak wawancara Media Keuangan bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selaku Ketua Panitia Pemerintah pembahasan UU PNBPN Tahun 2018.

Hal apa yang melatarbelakangi disusunnya UU PNBPN yang baru?

Ada beberapa hal dalam UU PNBPN lama (1997) yang memerlukan penyempurnaan. Hal pertama, UU baru ini sangat penting bagi konsistensi penerapan PNBPN sejalan dengan reformasi UU Keuangan Negara Tahun 2003. Kedua, ada beberapa temuan BPK yang bersumber dari implementasi UU PNBPN lama yang berisiko bagi tata kelola PNBPN di Kementerian/Lembaga (K/L).

Ketiga, untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini tata kelola keuangan negara, baik di K/L sebagai penghasil PNBPN maupun penguatan di Kementerian Keuangan. UU ini memberi harapan perbaikan pada tata kelola, potensi PNBPN, dan kepastian hukum. Keempat, sebagai upaya penataan dan penyederhanaan jenis dan

tarif PNBPN, meliputi aspek keadilan, serta pengelolaan SDA yang *sustainable*.

Bagaimana proses legislasi UU PNBPN ini?

RUU ini telah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. Selanjutnya, pemerintah secara resmi menyampaikan RUU PNBPN melalui surat Presiden pada 23 Juni 2015 kepada DPR RI.

Dinamika pembahasan RUU di DPR selalu berkembang. Ditjen Anggaran sebelumnya mengawal sepenuhnya pembahasan RUU pada 2016-2017. Selanjutnya, pada 2018 Menteri Keuangan menugaskan kami (Sekretaris Jenderal) sebagai Ketua Panitia Pemerintah untuk melanjutkan pembahasan bersama di DPR. Dengan dukungan dari tim teknis Kemenkeu, baik dari Direktorat PNBPN di Ditjen Anggaran maupun Biro Hukum di Sekretariat

Jenderal, pembahasan RUU ini semakin baik dan cepat, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama UU dapat disahkan pada 26 Juli 2018.

Hal-hal penting apa yang disempurnakan dalam UU PNBPN baru?

Pertama, UU baru mempertegas definisi PNBPN. Kedua, objek PNBPN dikelompokkan menjadi 6 klaster, yaitu pemanfaatan SDA, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Ketiga, mempertegas pengenaan tarif. Secara eksplisit, UU ini memuat tarif hingga nol persen maupun nol rupiah. Dari sisi objek, dibedakan SDA terbarukan dan tidak terbarukan. Kriteria penarifan disesuaikan dengan objek baru dengan memperhatikan *business*, keberlangsungan SDA, dan keadilan bagi masyarakat, sehingga diharapkan *in line* dan tepat.

Selanjutnya, diatur sanksi yang lebih tegas bagi wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Diperkenalkan pula mekanisme pengurangan PNBPN bagi wajib bayar yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena kondisi tertentu, serta peran aparat pengawas untuk melakukan pemeriksaan.

UU PBNPN baru memuat kebijakan pengenaan tarif hingga nol rupiah atau nol persen. Apa tujuannya dan bagaimana dampaknya bagi potensi penerimaan?

Diskresi untuk memberikan fasilitas pengenaan tarif yang lebih rendah selalu ada. Sebab, di situ letak pemerintah memperhatikan keadilan bagi masyarakat. Beberapa penerapan tarif hingga nol rupiah atau nol persen adalah pada layanan dasar dan pendidikan, layanan yang bersifat budaya, serta yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Esensinya dengan tarif ini, pemerintah tetap bisa memberikan pelayanan, meski masyarakat tidak dibebani kewajiban membayar. Kompensasinya dari mana? Ya pemerintah bisa memainkan peran regulasinya.

Prinsip PNBPN itu ada tiga. Pertama, *cost recovery*, tarif pungutan berdasarkan *cost*-nya. Kedua, *cost plus*, yaitu pungutan lebih besar dari biaya penyelenggaraan, bergantung pada keekonomian dan pertimbangan yang memungkinkan diterapkannya tarif itu. Hal ini bisa jadi *cross subsidy*. Ketiga, *cost minus* tadi. Jadi digratiskan kepada masyarakat.

Dari aspek penerimaan, penerapan tarif dengan nol persen atau nol rupiah ini tidak berdampak signifikan.

Sebab, keseluruhan PNBPN dilihat dari perencanaan masing-masing K/L, mengusulkan berapa, dan kebutuhan fiskal APBN kita berapa.

Itu yang dibahas dan diverifikasi dalam penentuan tarif.

Bagaimana potensi pendapatan negara dengan UU PNBPN yang baru?

Pertama, dari perencanaan akan lebih baik. Mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga penetapan. Kedua, masing-masing objek PNBPN memiliki struktur tarif yang memungkinkan pengelolaan dan perolehan PNBPN jauh lebih optimal. Misalnya, untuk (tarif) SDA tidak terbarukan, bukan hanya *replacement cost* dari SDA yang dieksploitasi, melainkan harus memikirkan SDA yang tidak tergantikan itu bagaimana.

Selanjutnya, institusi yang mengelola perencanaan PNBPN juga diperkuat. K/L, Kemenkeu selaku CFO, selaku BUN, aparat pengawas internal, APIP, juga diberdayakan, sehingga mekanisme perencanaan, penetapan, pengelolaan, pemungutan, pertanggungjawaban akan jauh lebih baik.

Adakah pemberlakuan sanksi baru terhadap wajib bayar yang tidak patuh dalam menyetorkan PNBPN? Bagaimana sanksi baru tersebut dalam memberikan efek jera?

Untuk K/L yang tidak disiplin menyetorkan PNBPN, tersedia peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, itu akan jadi temuan audit. Kedua, jika ada *fraud*, berlaku UU ASN, UU Disiplin Pegawai, UU Pidana, dan sebagainya. Ini berlaku bagi instansi atau unit yang melakukan pemungutan PNBPN.

Hal utama dalam UU ini, bagi wajib bayar yang dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PNBPN akan dikenakan sanksi 4 kali

jumlah PNBPN terutang dan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun. Selanjutnya, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen yang dimiliki, atau memberikan dokumen yang dimiliki namun isinya tidak benar, dikenakan denda paling banyak Rp1 miliar, atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Perumusan sanksi ini lebih bisa memberikan efek jera dan *deterrent effect*, agar tidak diulangi kembali.

Adakah rencana untuk melakukan simplifikasi terkait jenis dan tarif PNBPN ke depan?

Hal ini sudah menjadi perhatian DPR dan memang sudah diputuskan untuk dilakukan simplifikasi jumlah tarif. Melalui UU ini, K/L berkesempatan menata kembali PNBPN mana yang bisa memberikan kontribusi memadai pada penerimaan, untuk meningkatkan pelayanan, sekaligus *at the same time* memberi aspek keadilan yang diperlukan.

Bagaimana peningkatan aspek pengawasan dan kepatuhan wajib bayar dalam UU PNBPN yang baru ini?

Jika bicara pengawasan, yang paling utama adalah pengawasan melekat pada instansi yang memungut PNBPN. Untuk meningkatkan pengawasan, terdapat audit, baik atas permintaan kepada BPKP maupun BPK yang selalu melakukan audit terhadap berbagai pos penerimaan dan belanja di APBN. Jadi, selain melekat pada instansi, juga dilakukan pengawasan oleh APIP maupun BPK.

Teks Farida Rosadi

Seni Rupa Untuk Diplomasi Budaya



Pustanto,
Kepala GNI

Foto
Anas Nur
Huda

Seni rupa bisa dikatakan sudah setua usia manusia. Pada awalnya, seni rupa merupakan sarana berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Beberapa karya seni tua bahkan kerap dianggap sakral atau magis. Pustanto, kepala Galeri Nasional Indonesia, menceritakan kepada Media Keuangan, bagaimana hasanah seni rupa Indonesia yang begitu kaya kini berkembang menjadi media diplomasi budaya.

Seperti apa keistimewaan sejarah Galeri Nasional Indonesia?

Berdirinya GNI merupakan salah satu upaya mewujudkan Wisma Seni Nasional yang menjadi cita-cita sejak tahun 60-an. Cetak biru Wisma Seni Nasional telah digariskan oleh Presiden Pertama RI, Soekarno. Beliau bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar, berbudaya, dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia.

Cita-cita tersebut sempat maju mundur setelah Soekarno turun. Namun, kemudian dibangkitkan kembali oleh Bapak Fuad Hassan yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau memprakarsai renovasi gedung milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Medan Merdeka Timur No.14 Jakarta menjadi Gedung Pameran Seni Rupa (GSPR). Tempat

ini menjadi sarana aktivitas dan apresiasi seni rupa yang diresmikan pada tahun 1987.

Tahun 1993–1999 saat Bapak Wardiman Djojonegoro menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bapak Edi Sedyawati diangkat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, GPSR diperluas tugas dan fungsinya menjadi Galeri Nasional Indonesia atau GNI. Tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan seni rupa, GNI juga bertugas menyimpan, merawat, memanfaatkan serta memberi edukasi karya seni, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keistimewaan lainnya, gedung GNI yang berarsitektur kolonial Belanda ini dibangun pada tahun 1902 sehingga terdaftar sebagai cagar budaya. Selain itu, GNI yang berlokasi di Medan Merdeka Timur juga menjadi istimewa karena berada di pusat pemerintahan atau ring-1, bersama-sama dengan Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara, Museum Nasional Indonesia di Medan Merdeka Barat, serta Perpustakaan Nasional Indonesia di Medan Merdeka Selatan, mengelilingi Monumen Nasional yang menjadi sentral ibu kota.

Seperti apa panduan yang disediakan bagi pengunjung, baik lokal maupun asing?

Ada 3 jenis panduan yang kami sediakan bagi semua pengunjung,

baik lokal maupun asing. Pertama, panduan berupa *digital signage*. Panduan ini menggunakan beberapa TV layar sentuh di dalam ruang pameran tetap. Kontennya adalah deskripsi karya yang dipamerkan di ruang pameran tetap. Kedua, kami juga menyediakan panduan berupa publikasi cetak yang bisa dibaca berulang-ulang. Diantaranya leaflet, buku profil, dan katalog.

Selain itu, kami juga menyediakan panduan oleh edukator dan kurator. Pemanduan ini biasanya ditujukan untuk pengunjung kelompok. Untuk mendapatkan pemanduan jenis ini, panitia atau penanggung jawab kunjungan bisa mengirimkan surat resmi ke GNI untuk meminta panduan oleh edukator atau kurator kami.

Sejak 2015 GNI mengubah konsep dan tata ruang pameran tetap. Mengapa?

Konsep dan tata ruang Pameran Tetap berdasarkan periodisasi perjalanan seni rupa Indonesia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran sejarah di masyarakat. Urutan ini sekaligus bisa menjadi inspirasi dalam melihat dan melangkah ke masa depan.



Suasana di dalam Galeri Nasional.

Foto Anas Nur Huda

Periodisasi itu juga penting agar masyarakat dapat melihat bagaimana perjalanan bangsa ini yang tidak dapat dipisahkan dari peran para seniman. Dengan begitu, seni Indonesia dapat dilihat sebagai sesuatu yang luas, terus bergerak, dinamis, saling mempengaruhi, atau bersifat diakronik dalam sejarah.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menikmati koleksi GNI?

Saat ini GNI memiliki kurang lebih 1.842 koleksi. Namun tidak semuanya dipamerkan di ruang Pameran Tetap. Di ruang

Pameran Tetap, kami hanya menampilkan sekitar 120-an karya dari keseluruhan koleksi tersebut. Sisanya kami simpan di dalam ruang penyimpanan karya. Jadi, waktu 2 jam sangatlah cukup untuk mengapresiasi seluruh karya yang dipamerkan di ruang Pameran Tetap.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam merawat seluruh koleksi GNI?

Tentu saja seluruh pihak yang ada di GNI terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, pengurusan dan perawatan keseluruhan koleksi GNI secara khusus dilakukan oleh Seksi Pengumpulan dan Perawatan. Seksi ini bertugas melakukan penyimpanan, pendokumentasian, serta perawatan karya koleksi GNI melalui konservasi dan restorasi. Sedangkan untuk pengawasan secara khusus dilaksanakan oleh para petugas pengamanan.

Namun, kegiatan pengawasan juga dapat dilakukan oleh para pengunjung dengan mematuhi tata tertib kunjungan di ruang pameran. Pengunjung juga dapat saling mengingatkan apabila ada pengunjung lain yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, khususnya yang dapat mengarah kepada kerusakan atau vandalisme terhadap karya koleksi yang dipamerkan.

Seperti apa peran GNI dalam diplomasi kebudayaan internasional?

GNI berperan aktif dalam menjadikan acara seni rupa dan program terkait sebagai praktik diplomasi kebudayaan dalam kancah internasional. Aspek komunikasi dan nilai yang terkandung dalam karya seni rupa menjadi modal penting di tengah pergaulan internasional.

GNI juga menjadi wadah pertukaran informasi dan budaya antara publik seni Indonesia dan internasional. Sebagai contoh, GNI aktif menyelenggarakan



program pameran kerjasama dengan pusat kebudayaan asing dan kedutaan besar di Indonesia.

Salah satu program GNI adalah pameran keliling internasional. Tujuan pameran ini adalah untuk memperkenalkan karya seni rupa seniman Indonesia, baik karya yang sudah menjadi koleksi negara di GNI maupun karya seniman kontemporer.

Pameran keliling tersebut telah sukses dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2007. Diantaranya di Malaysia, Thailand, Vietnam, Aljazair, Myanmar, Amerika Serikat, Australia, Kamboja, dan Jerman. Pada tahun 2017 lalu GNI juga terlibat dalam Festival Europalia Indonesia di Belgia dengan menampilkan seni instalasi kontemporer di Brussel dan Antwerp.

Bagaimana strategi GNI agar kunjungan ke galeri seni menjadi lebih populer?

Seiring dengan perkembangan teknologi *digital*, GNI mulai dikunjungi generasi muda. Pada awalnya tentu mereka tertarik karena tren swafoto di lokasi-lokasi yang spesifik seperti galeri seni, museum, atau gedung bersejarah. Hasil foto tersebut mereka unggah ke

media sosial sehingga menjadi viral. Secara tidak langsung, hal ini mengundang pengunjung baru.

Kami kemudian memanfaatkan fenomena ini dengan lebih banyak mempublikasikan diri secara digital melalui website, Twitter, Facebook, Instagram, Line, dan Youtube. Strategi ini terbukti cukup efektif. Dalam lima tahun terakhir jumlah pengunjung GNI selalu mengalami peningkatan. Tahun 2017 ada hampir 280 ribu pengunjung, meningkat jauh dibanding tahun 2013 sebanyak 66 ribu pengunjung.

Pesan apa yang ingin GNI sampaikan ke benak pengunjung?

Kami berharap pengunjung memiliki rasa bangga akan seni rupa Indonesia yang juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan. Dengan memahami koleksi seni rupa yang ada, mereka akan ikut menjaga dan merawat warisan budaya ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Selain itu, kami berharap pengunjung memiliki pengetahuan baru yang dapat mendorong kreativitas untuk menciptakan kreasi-kreasi baru dalam berbagai bentuk. Apresiasi terhadap karya seni rupa juga dapat ditularkan, baik melalui diskusi maupun publikasi, sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk menciptakan karya seni.

Akhirnya, seni rupa di GNI memiliki benang merah dengan penciptaan karya seni yang baru dan menyumbang perkembangan dan eksistensi seni rupa Indonesia. Apalagi seni rupa merupakan salah satu media diplomasi budaya yang menjadi wajah bagi Indonesia untuk dilihat di mata dunia.

Teks Irma Kesuma

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

Pengawal Transformasi Digital Kementerian Keuangan

Kemajuan teknologi begitu dinamis tumbuh di segala bidang. Fenomena ini menuntut semua pihak untuk aktif mengikuti perkembangannya. Tak terkecuali bagi Kementerian Keuangan. Untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, pengelola keuangan negara ini butuh sebuah unit khusus untuk mengawal transformasi kelembagaan di era digital ini.

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) merupakan unit Eselon II yang bertanggung jawab pada Menteri Keuangan melalui Sekretariat Jenderal. Unit ini dibentuk berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 203/KMK.01/2004. Tugas utama organisasi ini adalah sebagai penggerak inti transformasi di bidang teknologi informasi di Kementerian Keuangan.

Setelah lebih dari satu dekade dan melalui beragam perubahan dalam struktur kelembagaan, kini Pusintek terdiri dari satu bagian dan enam bidang yang berada di Jakarta. Pegawai di unit ini jumlahnya mencapai 310 pegawai.

Sempurnakan Layanan

Selain mengelola bidang teknologi dan informasi di pusat, Pusintek juga membawahi enam buah unit vertikal yang tersebar di daerah. Kantor Pengelolaan Teknologi dan Informasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) adalah perpanjangan tangan Pusintek di penjurusan Indonesia. Lokasi KPTIK-BMN terdapat di Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar,

dan Makassar, serta satu unit kantor Pengelolaan Pemulihan Data (KPPD) yang khusus menangani pengelolaan *Disaster Recovery Center* (DRC) Kementerian Keuangan, selain itu masih ditambah untuk pengelolaan Gedung Keuangan Negara (GKN), dengan 151 personil, sehingga secara keseluruhan pegawai Pusintek sebanyak 461 personil. Bisa dibayangkan, Pusintek adalah organisasi terbesar di Sekretariat Jenderal.

"Memang jadi menantang, tapi kami selalu berkoordinasi dengan baik. Masalah di daerah bisa di-eskalasi dan ditangani dengan cepat," ungkap Herry Siswanto, Kepala Pusintek ketika ditanya tentang tantangan membawahi unit vertikal di daerah. Menurut Herry, koordinasi antara kantor pusat dan vertikal dilakukan sebaik-baiknya melalui berbagai cara.

Selain menjaga kestabilan internal, Pusintek juga terus tingkatkan kualitas hubungan dengan para *stakeholders*. Untuk menjamin kepuasan layanan yang diberikan, unit ini terlebih dulu merumuskan *service level agreement* (SLA). Dengan dibuatnya SLA, maka kedua belah pihak tahu ukuran pencapaian layanan yang dibutuhkan. Rangkaian evaluasi dan *monitoring* juga dilakukan untuk menunjukkan transparansi pengerjaan layanan.

Andil Dalam IMF-WBG Annual Meetings

Bulan Oktober nanti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank Group* (WBG) akan mengadakan gelaran

Annual Meetings yang diadakan secara simultan di Bali. Menteri Keuangan sebagai salah satu wakil ketua penyelenggara acara akbar tersebut menunjuk Pusintek sebagai penanggung jawab bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan audio visual (AV). Segala persiapan telah dan sedang dikerjakan. Berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul telah diurai dan dipetakan.

"Layanan yang kami siapkan dalam bidang TIK berupa penyediaan akses jaringan komunikasi data. Sedangkan untuk audio visual, kami bekerjasama dengan tim dari BKF dan BPPK terkait konektivitas dan perangkat pendukung penyiaran langsung liputan berita dari *venue* acara," ujar Herry.

Karena acara tersebut diselenggarakan di wilayah kerja KPTIK-BMN Denpasar, kantor di bawah naungan Pusintek tersebut turut dilibatkan dalam persiapannya. Pusat telah melakukan koordinasi untuk pembentukan tim teknis di lapangan dari unit vertikal Pusintek tersebut. Tim tersebut turut aktif dalam persiapan ruang kerja dan *loading* perangkat yang akan digunakan pada pertemuan internasional itu nantinya. Sedangkan pada saat acara berlangsung, tim tersebut akan menjadi bagian tim utama yang bertanggungjawab dalam pengelolaan teknis TIK dan AV.

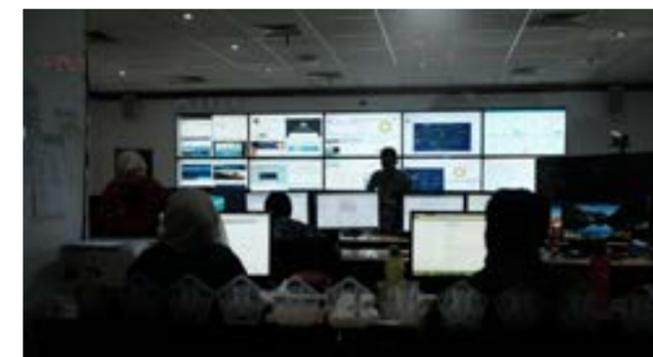
Terus Meraih Mimpi

Menteri Keuangan selalu menularkan semangat transformasi kelembagaan



Kapusintek bersama jajaran Eselon III di lingkungan Pusintek.

Foto
Resha Aditya Pratama



Ruang Server dan Ruang Monitoring Pusintek.

Foto
Anas Nur Huda

di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini membuat keinginan Sekretariat Jenderal untuk menjadi *prime mover* makin berkobar. Sebagai unit di bawahnya, Pusintek pun makin terpacu memperbaiki organisasinya sampai jadi yang terbaik.

Beragam sertifikasi internasional di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mereka dapatkan. Diantaranya adalah sertifikasi standar internasional mengenai ISO 20000 *IT Service Management* (manajemen layanan TIK), ISO 27001 *Information Security Management System* (sistem manajemen keamanan informasi), dan ISO 9000 *Quality Management System* (sistem manajemen mutu). Prestasi itu mewajibkan tiap pegawai melakukan tugasnya sesuai dengan standar internasional yang harus dipertahankan.

Dalam pengelolaan layanan TIK Kemenkeu, Pusintek berhasil menurunkan *downtime* layanan TIK dari tahun ke tahun hingga 0,0077 persen (2018), mencegah serangan siber, dan pemenuhan layanan sesuai norma waktu. Capaian tersebut bahkan jauh melampaui satu target yang telah ditetapkan tiap tahunnya. Layanan yang diberikan Pusintek dalam mendukung *e-government* pun diberi predikat terbaik dari Penghargaan Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGI) berturut-turut dari tahun 2012. Prestasi terbaru diraih oleh tim *Service Desk* Pusintek yang berhasil meraih penghargaan dari Indonesia *Contact Center Association* (ICCA) dalam beragam kategori.

Tak Puas Lampau Batas

Segala capaian dan prestasi yang terus diraih Pusintek tak membuat

jajaran di kantor ini lantas berpuas diri. Misi ke depan Pusintek adalah membangun sistem informasi manajemen keuangan yang terjalin sempurna dan terjamin keamanannya. Tak berhenti di situ, unit pengelola TIK ini juga ingin meningkatkan perannya tak hanya sebagai *business support* tetapi menjadi *business enabler*.

Kemajuan teknologi sangatlah dinamis. Hal ini menuntut Pusintek untuk selalu reaktif terhadap perkembangan teknologi terkini. Herry percaya dengan manajemen sumber daya manusia yang baik dan peningkatan kapabilitas jajarannya, semua itu bisa diraih. "Saya percaya komposisi dan kompetensi pegawai yang makin baik, membuat kami siap mengawal transformasi digital di Kementerian Keuangan," tutupnya.

Teks Dimach Putra

Agung Widiadi,
Direktur Sistem Penganggaran, DJA.

Pesan Orang Tua Untuk Terang Dunia

Sore hari di sekolah setingkat SMA, sesosok pemuda aktif berlari-lari. Teriakan komando pun saling bersahutan. Saat itu, ia dan beberapa anak muda lainnya sedang melakukan latihan baris-berbaris pramuka. Selain itu, pemuda itu juga aktif dalam kegiatan kemanusiaan Palang Merah Remaja dan bermain bola. Terbiasa hidup mandiri dan bekerja keras sudah menjadi kebiasaannya. Hasilnya, ia dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S2 *Public Finance* hingga ke Amerika Serikat dan mampu membawa instansinya untuk menghadapi era digitalisasi. Ialah Agung Widiadi, Direktur Sistem Penganggaran (DSP) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Satu almamater dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di University of Illinois at Urbana Champaign menjadi salah satu kebanggaan bagi dirinya. Di masa kuliahnya tersebut, ia belajar banyak hal baru yang pada saat itu belum banyak terdapat di Indonesia. Dengan begitu, sekembalinya ke Indonesia ia pun bersemangat untuk membagi ilmu dan mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajarinya.



Agung Widiadi

Foto
Rsha Aditya
Pratama.



Beberapa kontribusi perubahan pun turut disumbangkan. Salah satunya adalah perubahan format APBN yang dahulu T-account menjadi I-account sesuai dengan standar Government Financial Statistics (GFS) dari IMF. Dengan begitu, pengelolaan APBN diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Di sisi lain, dinamika proses penganggaran pun bertransformasi setelah adanya reformasi dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Transformasi digital penelaahan anggaran

Lahir pada tahun 1965, Agung menjadi salah satu saksi sejarah reformasi keuangan negara. Sejak masuk di Kementerian Keuangan pada tahun 1989, ia sudah merasakan berbagai jenis posisi pekerjaan. Ia pernah ditempatkan di Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran yang kemudian berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, pada 2004, ia juga turut merasakan bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang saat ini bertransformasi menjadi dua eselon I, yaitu DJA dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Terakhir ia pun didapuk menjadi Direktur Sistem Penganggaran di DJA. Berbagai inovasi pun ia lakukan untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan. Terkait penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), ia berusaha untuk menerapkan amanat dari Undang-Undang Keuangan Negara yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja.

“Nah jadi yang paling menarik di DSP ini proses penganggarannya karena kami punya harapan supaya penganggaran berbasis kinerja ini bisa diterapkan dengan seutuhnya, supaya bisa menjadikan APBN yang efisien, efektif terus kemudian bermanfaat bagi masyarakat atau sekarang istilahnya Bu Menkeu *value for money*” ungkapnya.

Untuk itu, ia berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Salah satunya adalah merancang suatu sistem untuk mendukung penelaahan RKAKL agar bisa dilakukan secara *on-line*. Meski sudah pernah dilakukan beberapa tahun, namun saat ini masih berupa *pilot project* pada beberapa Kementerian/Lembaga.

Mulai tahun penyusunan APBN 2019, ia menarget untuk melakukan penelaahan secara *on-line* untuk keseluruhan Kementerian dan Lembaga. Hal itu juga perlu dilakukan dalam rangka menghindari *moral hazard* karena hubungan Kementerian/Lembaga yang langsung berkomunikasi dengan pegawai di DJA saat melakukan pengurusan anggarannya.



“Artinya, secara *on-line* itu K/L enggak perlu datang lagi ke sini tapi kita tetap bisa melakukan penyusunan dan penelaahan RKAKL tadi secara *on-line*. Cukup diatur jadwalnya kapan, lalu bisa berdiskusi melalui *e-mail* atau melalui semacam *chatting* tetapi didukung dengan dokumen-dokumennya yang juga elektronik. Jadi bisa dilakukan dari jarak jauh,” jelasnya.

Terang dunia

Sosok ayah, Slamet Bunyamin, dan Ibu, Ismoewati, menjadi salah satu motivasi terbesar Agung. Ayahnya merupakan sosok guru yang juga menjadi Kepala Sekolah. Oleh karena itu, disiplin dan semangat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi salah satu pesan dari sang ayah. Selain itu, ayahnya juga menitipkan pesan agar setiap anaknya dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat atau dengan kata lain menjadi ‘terang dunia’.

Dengan bekal keteladanan dan kemandirian serta semangat untuk sekolah setinggi-tingginya, ayahnya berharap keempat anaknya mampu bekerja sebaik-baiknya dimana pun berada. Paling tidak menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat atau dengan kata lain bermanfaat bagi masyarakat. “Dia bisa menjadi terang bagi yang lain. Mungkin itu yang cukup berkesan,” ceritanya.

“Nah jadi yang paling menarik di DSP (Direktorat Sistem Penganggaran) ini proses penganggaran-nya karena kami punya harapan supaya penganggaran berbasis kinerja ini bisa diterapkan dengan seutuhnya, supaya bisa menjadikan APBN yang efisien, efektif terus kemudian bermanfaat bagi masyarakat atau sekarang istilahnya Bu Menkeu *value for money*.”

Agung saat beraktivitas bersama keluarga.

Foto Dok.Pribadi

Di sisi lain, sang ibu yang berprofesi sebagai bidan di Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) juga memberikan nilai kemandirian dan tolong-menolong kepada diri Agung. Sosok ibu yang merupakan lulusan sekolah Bidan, satu tingkat di bawah universitas, juga mendorong anak-anaknya agar mampu bersekolah lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, anak-anaknya pun terpacu untuk sekolah dan berhasil menjadi sarjana di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, theologia, dan pertanian. Dirinya pun sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari Kementerian Keuangan karena memperoleh kesempatan untuk memperoleh beasiswa ke Amerika dengan jurusan *Public Finance*.

Meski bekerja dengan waktu yang dinamis untuk membantu persalinan, sang ibu juga mengajarkan nilai kemandirian dengan mendorong anak-anaknya membuat jadwal dan mengatur dirinya sendiri. “Belajar atau tugas, ya, diminta menyelesaikan sendiri sepanjang menurut beliau (ibu) itu bisa dilakukan, ya pasti mereka akan membiarkan kita untuk menyelesaikan masing-masing. Tidak perlu harus dibantu, jadi supaya dengan demikian bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu,” ujarnya.

Keluarga

Dengan pola kerja yang semakin menantang, dukungan dari keluarga pun menjadi hal yang tak bisa dilepaskan. Sang istri, Maria Kristianingrum, dan kedua anaknya, Irene Cinantya Agung dan Grace Emanuela Agung, pun sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada dirinya.

Ditanya terkait membagi waktu dengan keluarganya, Agung menguraikan bahwa ia sudah terbiasa dengan mengatur waktu sejak masuk di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Saat itu, kondisi jalanan yang macet sudah terjadi. Untuk itu, ia pun harus mengatur waktu agar dengan moda transportasi yang terbatas dapat mencapai kantor tanpa terlambat.

“Sekarang pun saya berusaha mengatur waktu sedemikian rupa supaya kalau bisa pekerjaan di kantor selesai di kantor saja, sehingga waktu untuk yang lain itu bisa untuk bersama-sama keluarga atau mengerjakan yang lain,” jelasnya.

Di akhir pekan pun ia gunakan untuk meningkatkan komunikasi dengan keluarga. Tak jarang ia mengajak anak-anaknya untuk bersepeda, pergi ke toko buku, kebun binatang, atau menonton bioskop. Selain itu, ia juga rutin menemani anaknya bermain piano atau biola. Bakat bermain alat musik tersebut menurun dari bakat sang ibu yang juga mengajar paruh waktu di salah satu sekolah musik.

Harapan

Soal harapan terhadap institusinya, Agung merasa masih perlu untuk menggali potensi yang masih ada di lingkungannya. Tujuannya supaya kontribusi dari diri sendiri maupun dari lingkungan mengenai tantangan peningkatan kualitas APBN bisa terwujud sehingga APBN semakin berkualitas, semakin efisien, semakin bermanfaat bagi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi semaksimal mungkin untuk Kementerian Keuangan dan juga pemerintah secara keseluruhan.

“Ini kan menjadi harapan saya untuk bisa banyak berperan di situ karena pengalaman selama ini di masyarakat begitu ya. Berbagai perubahan yang terjadi dengan adanya teknologi informasi ini sangat luar biasa makanya mau *enggak* mau Kementerian Keuangan dan DJA khususnya juga harus banyak-banyak memanfaatkan momentum seperti itu untuk peningkatan kualitas tadi,” urainya.

Untuk diri sendiri, ia juga memiliki rencana untuk menulis buku. Selain itu, ia juga memiliki keinginan yang besar untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan, terutama terkait dengan transformasi digital di pemerintahan. “Di pemerintahan ini memang transformasi menuju digital (masyarakat digital). Itu mungkin hal yang penting yang saya ingin pelajari lebih jauh untuk bisa diterapkan di Kementerian Keuangan. Jadi mungkin itu sekaligus bagaimana kita mengikuti perubahan dan adaptasi dengan perubahan, dan sekaligus memanfaatkan momentum perubahan itu untuk perbaikan organisasi maupun pencapaian visi Kementerian Keuangan secara keseluruhan,” tutupnya.

Teks Abdul Aziz

Foto Ilustrasi
Anas Nur Huda

Ketahanan Ekonomi Diuji

Meninggalkan akhir kuartal kedua 2018, perekonomian Indonesia diwarnai berbagai perkembangan positif. Namun di saat yang sama, Indonesia tidak dapat mengelak dari risiko global. Diantaranya adalah penguatan Dolar AS yang mempengaruhi aliran modal dan investasi ke negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan melebihi ekspektasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal kedua 2018 mengalami peningkatan menuju 5,27

persen (*year on year/yoy*). Penguatan ini terbilang mengagetkan, karena utamanya didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat menuju 5,22 persen (*yoy*). Periode libur hari raya Idul Fitri yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya mendorong kenaikan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sementara investasi tetap bertumbuh positif, meski sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 5,87 persen (*yoy*). Pertumbuhan investasi yang lebih rendah diindikasikan juga akibat periode liburan, sehingga beberapa aktivitas bisnis dihentikan.

Komponen PDB lainnya yaitu konsumsi pemerintah dan tingkat ekspor bersih (*net export*) masing-masing berkontribusi secara positif dan negatif terhadap pertumbuhan PDB. Konsumsi pemerintah meningkat menuju 5,26 persen pada kuartal kedua 2018. Hal ini ditengarai seiring dengan besarnya belanja pegawai dan masih positifnya belanja modal di kuartal tersebut. Belanja pegawai contohnya adalah pengucuran tunjangan hari raya bagi pegawai pemerintah, sedangkan belanja modal terkait pengerjaan proyek infrastruktur dan proyek strategis pemerintah lainnya.

Sementara itu, ekspor bersih justru mengalami penurunan pertumbuhan. Hal ini berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, meningkatnya impor menopang pertumbuhan investasi di dalam negeri yang besar, sehingga dapat dikatakan bertujuan positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Sementara dari sisi eksternal, meningkatnya harga komoditas dunia menyebabkan impor komoditas tetap tinggi guna menopang kebutuhan konsumsi bahan bakar domestik. Penguatan Dolar AS juga menyebabkan impor secara nominal meningkat. Meskipun secara *net* positif, pertumbuhan ekspor tetap naik menuju 7,7 persen, sedangkan peningkatan impor lebih besar yaitu 15,17 persen (*yoy*).

Apabila mengamati komposisi pertumbuhan PDB secara sektoral, kenaikan pertumbuhan PDB masih ditopang oleh sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan. Pertumbuhan di sektor tersebut meningkat pada kuartal kedua sebesar 3,81 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan semakin panjangnya periode panen raya tahun ini, dari sebelumnya

hingga Maret 2018 menjadi hingga Mei 2018.

Sementara itu, sektor pertambangan semakin menggeliat karena meningkatnya harga komoditas dunia, termasuk batu bara dan kelapa sawit. Sektor lainnya, yaitu sektor sekunder seperti manufaktur, dan sektor tersier seperti perdagangan, mengalami penurunan pertumbuhan menuju masing-masing 4,61 dan 5,81 persen (*yoy*) di kuartal kedua 2018.

Karena sebagian besar didorong oleh adanya *holiday festivities*, ke depannya seluruh komponen PDB, terutama investasi dan konsumsi, diharapkan tetap baik. Pertumbuhan investasi diharapkan kembali naik, sedangkan pertumbuhan konsumsi dapat terjaga di level pertumbuhannya saat ini.

Stabilitas Ekonomi Domestik Bertahan, Eksternal Dibayangi Risiko

Selain pertumbuhan ekonomi kuat, stabilitas harga dalam negeri juga baik. Hal ini diharapkan berkontribusi dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada Juli 2018, inflasi menurun ke level 3,18 persen (*yoy*). Hal tersebut didukung oleh lebih stabilnya harga-harga bahan pangan karena periode panen yang lebih panjang

Selain stabilitas harga, hingga Juli, keseimbangan fiskal turut membaik. Ini ditunjukkan dengan perbaikan pada keseimbangan primer menuju (negatif) Rp4,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar (negatif) Rp79,1 triliun. Selain itu, defisit juga lebih kecil dibandingkan sebelumnya, yaitu 1,02 persen dari PDB. Fiskal yang sehat ini didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak menuju 14,6 persen (*yoy*), serta bea dan cukai menuju 16,4 persen (*yoy*). Selanjutnya, tingkat penyerapan belanja Kementerian/Lembaga masih dalam tren meningkat.

Meski relatif stabil, kondisi eksternal masih berisiko bagi perekonomian. Hal ini tercermin dari kondisi neraca transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) Indonesia yang mengalami pelebaran menuju 3 persen dari PDB. CAD mencerminkan posisi Indonesia, apakah sebagai *net* importir atau eksportir atas barang, jasa, dan pendapatan. Defisit cukup signifikan karena termasuk yang terburuk sejak kuartal kedua 2014 atau berdekatan dengan periode *Fed Taper Tantrum* mencapai 4,26 persen dari PDB.

Pelebaran CAD juga akibat semakin kecilnya surplus neraca barang pada kuartal kedua 2018. Hal ini terjadi karena permintaan domestik di sektor non-migas, terutama impor barang modal. Meski secara umum, impor barang modal diperkirakan berdampak positif, otoritas terkait mulai memikirkan cara untuk memitigasinya, sehingga performa CAD bisa lebih stabil. Selanjutnya, performa neraca jasa yang masih defisit serta neraca pendapatan primer juga perlu ditingkatkan.

Pasar Keuangan Global Mengalami Turbulensi

Bersamaan dengan normalisasi kebijakan ekonomi AS, terjadi pula gejolak pada pasar keuangan dunia. Selain itu, dampak perang dagang antara AS dan Tiongkok, serta kerentanan ekonomi di dalam rumpun *emerging market* sendiri, menyebabkan Rupiah ikut terkena dampaknya.

Salah satu sumber gejolak di rumpun *emerging market* adalah depresiasi pada Lira Turki dan Peso Argentina. Hal ini merespons anggapan pasar tentang lambatnya negara-negara tersebut dalam memberikan kebijakan terkait penguatan Dolar AS. Akibatnya, terjadi sedikit kepanikan yang *spillover effect*-nya sampai ke Indonesia.

Per 15 Agustus 2018, Rupiah

terdepresiasi sebesar 8 persen pada tahun kalender. Pelemahan ini cukup rendah di antara *emerging market* yang sedang dilanda tekanan. Namun, Indonesia belum lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN-5, seperti Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Artinya, masih diperlukannya penguatan koordinasi dalam pengambilan respons kebijakan terkait. Mengingat Indonesia memiliki pencapaian ekonomi yang cukup baik di kuartal kedua 2018.

Persepsi positif perekonomian Indonesia tercermin dari positifnya aliran modal asing ke surat utang negara (SUN). Hingga 15 Agustus 2018, modal masuk sebesar Rp8,4 triliun. Kondisi ini berbeda dengan posisi per Juni 2018, saat investor asing melakukan aksi jual SUN bersih sebesar Rp 6 triliun.

Selain fundamental, terdapat faktor harga, dimana SUN semakin murah secara relatif terhadap aset berdenominasi Dolar AS. Selisih tingkat imbal hasil SUN 10 tahun berdenominasi Rupiah dan Dolar AS meningkat, dari sebelumnya 2,9 *percentage point* di awal tahun menjadi 3,7 *percentage point* pada 15 Agustus 2018. Semakin murah aset Rupiah turut membantu perbaikan aliran modal asing. Di pasar saham, keluarnya arus modal asing juga menurun pada akhir Juli menuju Rp192,3 miliar atau lebih kecil dari Juni 2018 sebesar Rp250 miliar.

Respon Kebijakan Saat Ini dan Ke Depan

Sebagai respon dari kondisi perekonomian global dan domestik, *7-day (reverse) repo rate* (7DRR) dinaikkan 25 basis poin ke level 5,5 persen pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 Agustus 2018. Level 7DRR tersebut dianggap cukup akomodatif. Di satu sisi, kenaikan 7DRR dipercaya mempengaruhi pasar secara positif dan meredam keluarnya arus modal asing. Di sisi lain,



Andi Nugroho Suryo Kuncoro
Direktorat Pemeriksaan dan
Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak

pada Juni 2018 pertumbuhan kredit meningkat sebesar 10,75 persen dari bulan lalu sebesar 10,26 persen (yoy).

Hal ini menandakan bahwa dampak kenaikan 7DRR di 2018 belum mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap menurunnya performa investasi domestik. Meningkatnya pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan bahwa perekonomian masih menikmati turunnya 7DRR di tahun sebelumnya. Namun ke depan, BI mensinyalkan perlunya antisipasi kenaikan lanjutan dari suku bunga global.

Fokus perekonomian ke depan adalah menjaga performa pertumbuhan ekonomi agar tetap baik dan tidak hanya merupakan *one-off phenomena*. Selain itu, perhatian lebih perlu diberikan pada upaya memperbaiki ekspor. Contohnya, ekspor komoditas yang harganya mulai naik seperti batu bara dan kelapa sawit, dimana Indonesia bertindak sebagai produsen dunia.

Selain itu, dalam jangka pendek, optimasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Proyek Strategis Nasional perlu dilakukan. Begitu juga dalam upaya mendorong penggunaan produk domestik untuk konsumsi, serta peningkatan pertumbuhan sektor pariwisata. Dalam kondisi tertentu, proyek-proyek yang membutuhkan impor barang modal besar dan tidak *growth-sensitive* bisa diseleksi dan ditinjau kembali pelaksanaannya.

Dalam kurun waktu terakhir, depresiasi nilai tukar Rupiah mengundang banyak perhatian. Fenomena ini bersifat sementara disebabkan faktor eksternal, seperti penguatan nilai mata uang Dolar AS, serta makin terbukanya perekonomian di dunia, terutama di negara-negara *emerging market*. Pelemahan terutama menimpa seluruh mata uang negara-negara mitra dagang dan investasi AS, termasuk Indonesia. Negara berkembang perlu memikirkan bagaimana agar negara lebih siap menghadapi gejala eksternal ini. Sementara Indonesia, bagaimana agar memiliki performa dan fundamental yang lebih baik di antara negara-negara lain, sehingga lebih *resilient* terhadap gejala politik, ekonomi, dan keuangan di ranah global.

Salah satu yang perlu dieksplorasi adalah peran kebijakan pemerintah dalam mendukung perbaikan kondisi neraca transaksi berjalan. *Measure* ini layak menjadi fokus pertama ke depan. Saat ini CAD sudah lebih 'membengkak' dari periode terakhir saat CAD mengalami tekanan hebat, yaitu pada 2014, dimana pasar keuangan dunia dilanda 'tantrum'. Kepanikan yang dipicu normalisasi kebijakan moneter di AS ini menyebabkan berlariannya dana asing dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kala itu kita lebih tidak siap, sebab CAD masih *well above* 4 persen terhadap PDB. Lantas bagaimana dengan kuartal kedua 2018 di mana CAD mulai melebar?

Melebarnya CAD di saat Rupiah terdepresiasi memberikan sinyal kewaspadaan kepada otoritas moneter dan fiskal saat ini. Dari sisi moneter, suku bunga Bank Indonesia dinaikkan sampai 100 bps di tahun 2018 untuk menanggulangi depresiasi yang lebih dalam. Sementara dari sisi fiskal, pemerintah mengelola defisit anggaran secara lebih hati-hati (*prudent*), termasuk dalam hal meminimalkan risiko terdampaknya utang luar negeri dari fluktuasi nilai tukar terkini. Pemerintah juga perlu mempertahankan dan mengelola komitmennya dalam mendukung perekonomian riil, dengan menekan defisit transaksi berjalan, baik dari sisi mendorong ekspor maupun *smoothing* impor untuk menjaga fundamental perekonomian kita tetap baik.

Yang lebih penting lagi, kebijakan pemerintah juga perlu terus diarahkan mendukung sektor-sektor yang efek pemerataannya besar, seperti sektor pariwisata agar iklim sosio-ekonomi tetap terjaga di masyarakat. Isu *inequality* ini, selain fundamental untuk dipertimbangkan, juga tidak selayaknya dijadikan *residual* dalam pembuatan kebijakan. Melebarnya kesenjangan ekonomi dapat menjadi penyubur pohon radikalisme dan politik identitas di negeri kita. Kini, apakah bukan saatnya kita melihat kembali arti dan substansi dari "kondisi fundamental" kita?

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Teks Adelia Pratiwi
Staf Khusus Kepala Badan Kebijakan Fiskal,
Seconded Bank Dunia

Dapatkan kemudahan layanan informasi publik dengan

m-PPID

Teman Transparansimu

Unduh Sekarang di  dan segera di Appstore



Krisis Turki, Dinamika Global, dan Kewaspadaan Kita

Mahpud Sujai,
Peneliti Madya Pada Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral,
Badan Kebijakan Fiskal*)



Dinamika perekonomian global saat ini diliputi ketidakpastian. Amerika Serikat (AS) di bawah kendali Presiden Trump, terus menciptakan berbagai manuver yang sulit ditebak dengan dampak yang terasa hampir ke seluruh dunia. Setelah mengambil kebijakan ekonomi dan perdagangan yang proteksionis, Trump memberlakukan kebijakan yang memicu perang dagang (*trade wars*) dengan Tiongkok dan beberapa

negara lain termasuk Uni Eropa. Untuk kali ini, kebijakan yang diambilnya sangat mempengaruhi nilai mata uang. Kebijakan tersebut berupa peningkatan tarif impor baja dan aluminium yang membuat mata uang Turki, Lira, meluncur jatuh dengan cepat terhadap dolar AS.

Dipicu Krisis Turki

Lira Turki pada tahun ini telah melemah hingga 50 persen. Akibatnya, kondisi sektor keuangan

memburuk, sedangkan *capital outflow* dan inflasi meningkat tajam. Turki memang hanya menyumbang sebagian kecil dari porsi perekonomian dunia dan pasar uang global. Namun, secara psikologis dampaknya akan meluas ke wilayah-wilayah lain, seperti Eropa dan negara-negara *emerging economies*, termasuk Indonesia. Kondisi penuh ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor serta kekacauan di pasar uang dunia.

Turki dalam beberapa tahun terakhir merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, bahkan pada 2017 pertumbuhan ekonomi Turki lebih tinggi dibandingkan China dan India. Meski demikian, sektor keuangan Turki amatlah rapuh. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh utang luar negeri yang sebagian besar berdenominasi dolar AS dengan defisit fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan yang cukup tinggi.

Berdasarkan data IMF, rasio utang luar negeri Turki saat ini mencapai lebih dari 50 persen dari PDB. Akibatnya, ketika mata uang Lira anjlok, maka situasi akan bertambah buruk. Nominal utang akan berlipat, suku bunga akan meningkat, dan inflasi turut meningkat tajam.

Kondisi ini sudah seharusnya diwaspadai Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi nilai tukar rupiah juga terus melemah terhadap dolar AS, hingga mencapai level Rp14.600. Ini merupakan level terendah sejak krisis keuangan pada 2008. Perkembangan indikator-indikator perekonomian di Indonesia yang mirip dengan Turki, seperti meningkatnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya utang yang digunakan untuk mendorong pembangunan harus dijadikan pelajaran sebelum kondisi global bertambah buruk.

Salah satu faktor penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah adalah meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan. Artinya, nilai ekspor lebih rendah dibandingkan nilai impor dimana devisa yang keluar lebih banyak dibandingkan devisa yang masuk. Untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan menjadikannya bernilai surplus, diperlukan langkah yang komprehensif dan kerjasama yang baik diantara seluruh *stakeholders* di Indonesia, yaitu masyarakat, swasta, pengusaha, perbankan dan pemerintah.

Langkah-langkah Pemerintah

Kondisi ketidakpastian global ini telah memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Bahkan, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna menyatakan bahwa dinamika ketidakpastian ekonomi global harus diwaspadai dan diantisipasi dampaknya terhadap Indonesia. Semua aspek perlu diwaspadai, baik yang berkaitan dengan suku bunga, komoditas, arus modal masuk, arus modal keluar, nilai tukar, ekspor, impor, serta berbagai aspek lain yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yaitu memangkas impor, sehingga mengurangi jumlah devisa keluar. Hal ini dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah. Kebijakan

konkret pemerintah salah satunya menunda sejumlah proyek infrastruktur yang tidak mendesak, terutama yang memiliki nilai impor tinggi.

Selain itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan dan memperbaiki kemandirian pangan dengan memperkuat produksi pertanian seperti beras, kedelai, jagung, gula, daging, hortikultura dan produk lainnya. Sebab, tanpa kemandirian pangan, akan terus terjadi impor yang menguras devisa.

Selain menahan laju impor, pemerintah juga terus mendorong peningkatan ekspor melalui berbagai kebijakan. Diantaranya mempermudah perizinan ekspor, meningkatkan produksi barang ekspor, mencari alternatif pasar ekspor, dan merevisi berbagai peraturan dan regulasi. Hal ini juga berlaku di sektor mineral dan batubara. Dalam jangka pendek, *domestic market obligation* atau kewajiban untuk menjual batubara di pasar domestik diperlonggar. Tujuannya untuk mendorong ekspor, sehingga devisa terus bertambah.

Sektor Pariwisata Perlu Ditingkatkan

Langkah lain yang cukup penting dalam memperkuat nilai tukar rupiah adalah dengan mendorong sektor-sektor yang dapat mendatangkan devisa secara langsung. Salah satu sektor perlu lebih digenjut adalah

Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah juga dilakukan dengan mengatur penggunaan valuta asing dalam transaksi perdagangan internasional, dalam hal ini, ekspor dan impor, serta mengatur arus keluar masuknya modal dan investasi di Indonesia.

pariwisata. Sektor pariwisata merupakan penyumbang PDB, devisa, sekaligus lapangan kerja yang menjanjikan bagi Indonesia.

Tahun ini, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas dengan total nilai sebesar US\$ 20 miliar. Bahkan pada 2019, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar, melampaui sektor migas dengan nilai mencapai lebih dari USD24 miliar.

Penguatan pada sektor pariwisata tercermin dari kebijakan pemerintah yang menetapkan sektor ini sebagai prioritas pembangunan dan *core economy* Indonesia. Dari berbagai indikator, keberhasilan sektor pariwisata Indonesia terus meningkat, baik dilihat dari jumlah devisa, jumlah kunjungan wisatawan, porsinya terhadap PDB, jumlah lapangan kerja baru, dan berbagai indikator lain. Keunggulan kompetitif dan komparatif pariwisata Indonesia perlu terus ditingkatkan, termasuk pengembangan destinasi-destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan devisa yang masuk bagi Indonesia.

Peran Bank Sentral

Selain Pemerintah, Bank Sentral juga memiliki peran penting dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Saat kondisi mulai tidak stabil, Bank Indonesia segera masuk ke pasar guna melakukan intervensi menahan peningkatan laju dolar yang tidak terkendali. Selain itu,

Bank Indonesia juga meningkatkan suku bunga rupiah. Hal ini

untuk mengantisipasi peningkatan suku bunga di Amerika, peningkatan harga minyak, dan pengetatan kebijakan pasar uang di berbagai negara.

Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah juga dilakukan dengan mengatur penggunaan valuta asing dalam transaksi perdagangan internasional, dalam hal ini, ekspor dan impor, serta mengatur arus keluar masuknya modal dan investasi di Indonesia. Semakin banyak dana asing yang masuk, maka nilai tukar rupiah akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin banyak dana asing yang keluar, maka nilai tukar rupiah akan melemah.

Peran Masyarakat Perlu Didorong

Ketika kondisi perekonomian global penuh dengan ketidakpastian, maka peran masyarakat sangat penting dalam menjaga perekonomian suatu negara agar tetap kokoh. Sikap nasionalisme sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Masyarakat dapat berperan dalam memperkuat mata uang dengan berbagai cara, antara lain dengan tetap memegang rupiah dan tidak ikut panik melepas rupiah dan membeli dolar.

Selain itu, masyarakat harus terus didorong untuk mencintai produk lokal dan mengurangi pembelian produk-produk impor. Sebab dengan membeli produk impor, maka kita telah berkontribusi terhadap peningkatan devisa keluar dan pelemahan nilai tukar. Bentuk lain mencintai produk lokal adalah dengan berwisata di dalam negeri dan menghindari berwisata ke luar negeri. Wisata ke luar negeri menyebabkan berkurangnya devisa. Sebab devisa dibawa keluar dan digunakan untuk membeli mata uang asing.

Langkah lain adalah dengan meningkatkan porsi investasi masyarakat. Misalnya, dengan membeli surat utang negara atau reksadana. Hal itu akan menambah modal domestik untuk pembangunan dan mengurangi ketergantungan negara terhadap utang luar negeri.

Ketika semua *stakeholders* bersinergi dengan baik, maka perekonomian kita bisa lebih mandiri, kuat dan tidak mudah digoyang oleh kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Nilai tukar rupiah juga akan menguat dan stabil, serta minim goncangan maupun faktor eksternal yang membahayakan perekonomian. Ketika nilai tukar rupiah kuat, perekonomian tumbuh tinggi, dan stabilitas ekonomi terjaga, maka kesejahteraan seluruh masyarakat akan segera terwujud dengan baik.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja*

SBR004

Aku Pun Bisa Investasi

Masa Penawaran: 20 Agustus - 13 September 2018

Pembukaan Registrasi Calon Investor: 20 Agustus 2018

Pembukaan Registrasi Calon Investor: 20 Agustus 2018

Minimum Pemesanan: Rp1.000.000,-

Maksimum Pemesanan: Rp3.000.000.000,-

Jenis Kupon: Kupon Mengambang (d disesuaikan setiap 3 bulan) dengan tingkat Kupon Minimal **8,05%** per tahun

Pembayaran Kupon: Tanggal 20 Setiap Bulannya

Bentuk Obligasi **SBR004** tidak dapat diperdagangkan dan dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode Early Redemption

Tenor: 2 Tahun, jatuh tempo 20 September 2020 (Terdapat Fasilitas Early Redemption)*

Periode Early Redemption: 7 s.d. 15 Oktober 2019

Sebelum melakukan pemesanan pembelian, calon investor kiranya membaca dan memahami informasi yang tertuang di dalam Memorandum Informasi **SBR004**

*Syarat & Ketentuan Berlaku



Pemesanan Pembelian SBR004 dapat dilakukan **secara online** melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh 11 Mitra Distribusi di bawah ini



Tekun Merealisasi Mimpi

Seorang pemuda berdiri segaris di depan perpustakaan megah Bill Bryson. Letaknya di salah satu perguruan tinggi tertua di Inggris, Durham University. Kala itu, ia tengah mendampingi pimpinan dalam sebuah perjalanan dinas luar negeri. Saat gambarnya hendak diabadikan oleh sang pimpinan, ia menolak. “Tidak (usah) difoto, Pak. *Insha Allah*, saya akan kembali ke sini,” ujarnya yakin.

Dua tahun berselang, pemuda itu benar-benar kembali. Bedanya, kali ini bukan sebagai tamu, melainkan sebagai mahasiswa pascasarjana di universitas kelas dunia yang telah lama diimpikannya.

Dialah Greget Kalla Buana, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang mendalami bidang Keuangan dan Manajemen Syariah. Greget—demikian sapaan akrabnya—saat ini bekerja sebagai *Islamic Finance Specialist* di United Nations Development Programme (UNDP). Sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang pembangunan.

Bermula dari Cinta

Ketertarikan Greget pada bidang Keuangan Syariah bermula sejak duduk di tahun pertama jenjang sarjana. Setiap kali mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Keuangan Syariah, ada rasa ingin tahu dan kekaguman yang begitu besar. “Ini yang saya sebut dengan panggilan hati,” ungkapnya.

Terlebih, pekerjaan yang digelutinya

selalu sejalan dengan *passion*-nya tersebut. Greget pernah bekerja di Dompot Dhuafa dan Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Keduanya berhubungan dengan keuangan syariah.

“Rasa-rasanya, Allah telah dengan sempurna merancang dan menempatkan saya untuk berkarya di bidang Keuangan Syariah,” kata pemuda kelahiran 1990 ini.

Rencana untuk melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan kuliah di Universitas Sebelas Maret sempat terhenti lantaran pilihan bekerja. Alhasil, proses tersebut justru semakin memperkuat niatnya untuk melanjutkan studi.

“Ketika menginginkan sesuatu, saya akan mengejanya sampai mendapatkan yang terbaik (dari) yang saya mampu,” ujar penerima anugerah Alumni dengan Penghargaan Terbanyak pada Welcoming Alumni LPDP 2018 ini.

Bidang Keuangan dan Manajemen Syariah berhasil ia tuntaskan dalam kurun waktu sembilan bulan saja. Sementara tiga bulan waktunya diisi dengan menyelesaikan disertasi di Kota Mannheim, Jerman, melalui beasiswa Erasmus atas izin LPDP. Ia juga sempat memperoleh penghargaan Durham Award dari Durham University.

Diakuinya, tidak sedikit yang mempertanyakan keputusannya memilih Inggris dan Durham University untuk mempelajari keuangan syariah. “Menurut Thompson Reuters, pada 2016 Inggris

menjadi penyedia kursus Keuangan Syariah terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 69 kursus. Indonesia dan Malaysia masing-masing menawarkan 60 kursus,” sebutnya.

Bukan hanya itu, Durham University merupakan pelopor di bidang Keuangan Syariah dan masih memimpin hingga saat ini. “Inggris sendiri memproyeksikan negaranya menjadi salah satu pasar Keuangan Syariah terbesar. (Maka), sangat jelas mengapa saya memilih Durham.”

Langganan beasiswa

Sejak di bangku sarjana, tercatat beberapa kali Greget menjadi penerima beasiswa pendidikan. Diantaranya adalah beasiswa dari UNS atas prestasi sebagai Duta Bahasa Nasional, Beasiswa BRI, Beasiswa Aktivistis Nusantara (Baktinusa), dan Beasiswa Turki. Saat ditanya tentang pilihannya mengikuti seleksi LPDP, ia menjawab dirinya ingin menjadi salah satu dari orang terpilih. Sebab menurutnya, penerimaan beasiswa LPDP adalah orang-orang terpilih. Ia menambahkan, tidak adanya kuota dalam seleksi LPDP membuat setiap kandidat tidak bersaing satu sama lain.

“Satu-satunya pesaing adalah diri mereka sendiri dan inilah yang sejatinya sulit. Sebab, seseorang harus benar-benar memahami dirinya untuk dapat mencapai batas kemampuan terbaik yang bisa ia lakukan,” ujarnya. Melalui mekanisme ini, LPDP bukan hanya memperoleh kandidat yang terbaik dari yang baik, melainkan juga mendapatkan versi terbaik dari setiap orang.



Selama menjalani pendidikan di Durham University, berbagai kegiatan ia tekuni, diantaranya sebagai *student representative* untuk jurusan Islamic Finance and Management dan Wakil Ketua Eksternal di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Durham. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah menjadi pimpinan program kerja Khatulistiwa. Suatu pagelaran seni yang menggabungkan berbagai jenis kesenian. Khatulistiwa berhasil menyabet penghargaan sebagai Best Student Group Event dalam Durham Students' Union's Annual Award 2017. Greget sendiri masuk sebagai nominasi dalam ajang tersebut untuk kategori *Involvement to Community*.

Di bidang sosial, ia terlibat aktif di Islamic Society, Islamic Relief, serta Lembaga swadaya masyarakat lainnya dengan berpartisipasi dalam Charity Week, Discover Islam, dan Survival Camp untuk membantu para pengungsi Suriah. Ia juga beberapa kali tampil bermain angklung di acara-acara kelompok mahasiswa. Sedikit unik di bidang olahraga, ia memilih gliding sebagai aktivitas favorit dan bergabung dengan klub gliding universitas.



Kembali merajut mimpi

Kini Greget tengah mendalami praktik Keuangan Syariah di berbagai sektor, baik akademik, perbankan, maupun sosial. Ia bertekad untuk menjadi seorang *Islamic Finance Professional* yang tidak hanya menguasai bidang Ekonomi atau Keuangan Syariah secara teori, tetapi juga menjadikannya bagian dari komponen pembangunan.

“Apa yang saya kerjakan di UNDP, merupakan bagian dari kontribusi saya untuk Indonesia sebagaimana diamankan oleh LPDP,” ungkap penerima penghargaan *Incredible and Valuable Innovation Champion Across UNDP* itu.

Ia melanjutkan, “Kami (di UNDP) turut membantu pemerintah melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga, seperti Baznas, Kementerian Keuangan, OJK, Islamic Development Bank, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) melalui pembiayaan alternatif, salah satunya Keuangan Syariah,” terangnya.

Greget berpesan kepada mereka yang memiliki mimpi, untuk terus fokus dan mau berkorban. “Banyak orang bisa mengawali perjalanan dengan sangat indah. Namun, tidak semua bisa menuntaskannya ke garis finis. Untuk itu, selalu libatkan Allah dalam setiap langkah karena Dialah sejatinya penentu dari segala rencana,” pungkasnya.

Teks Farida Rosadi

Greget Kalla Buana bersama ibunya.

Foto dok. pribadi.

UTANG

Bukanlah Momok

Teks Hermawan Sukoasih, Pegawai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan



Ilustrasi
Arfindo Briyan

Pro kontra seputar utang negara sering terjadi karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Ketika seorang anak tenggelam di laut, ibunya berkata “Laut ini pembunuh.” Ketika seorang pemuda naik perahu dan dihantam badai, dia lalu berkata “Laut penuh marabahaya.” Tak lama datanglah seorang nelayan yang menemukan seongkah mutiara, dia kemudian berucap “Laut ini penuh berkah.”

Cara Memandang Utang

Begitu pula dengan cara pandang kita terhadap utang negara. Utang bisa dilihat dari kacamata politis, kacamata pengelola uang negara, atau dalam kacamata ekonomi dan bisnis sederhana.

Kita maklum, banyak pebisnis yang memiliki sejumlah aset. Ada tanah luas, gedung besar, dan karyawan hingga ribuan orang. Seringkali, sebagian besar asetnya tersebut diperoleh dari utang. Tanpa berutang, mungkin dia tidak akan bisa memiliki aset begitu banyak. Satu hal

yang perlu kita apresiasi, ribuan lapangan kerja yang tersedia menjadi berkah tersendiri bagi kita semua.

Utang negara kita boleh jadi naik cukup tinggi. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan, terutama infrastruktur, berkembang secara merata di seluruh tanah air. Artinya, seluruh anak bangsa bisa ikut menikmati.

Tentu kita ingat suasana mudik tahun 2018 lalu. Tidak terjadi terlalu banyak kemacetan dibanding beberapa tahun sebelumnya yang bahkan sempat menelan korban jiwa. Kala itu, pembangunan infrastruktur belum bisa mengimbangi pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan jumlah kendaraan.

Pembangunan Infrastruktur dan Mental

Infrastruktur yang semakin baik akan mempermudah dan mempercepat perputaran ekonomi dan bisnis. Contohnya, ada seorang distributor yang harus mengirimkan barang dari Bekasi ke Jakarta setiap hari. Biasanya, dia hanya hanya mampu mengirim satu kali sehari. Namun, dengan penambahan

atau perbaikan jalan, dia dapat mengirim barang dua hingga tiga kali sehari.

Bertambahnya kenaikan transaksi dengan sendirinya menambah pendapatan. Naiknya pendapatan para pengusaha tentu dibarengi dengan naiknya produksi nasional. Pada akhirnya, pendapatan negara baik melalui PPh maupun PPN akan meningkat.

Bukan hanya itu, harapan kita infrastruktur akan membuka lapangan kerja baru, seiring meningkatnya produktivitas perusahaan. Konsumsi penduduk juga bisa meningkat pesat karena pendapatan mereka juga naik.

Sebagai contoh, data BPS menunjukkan jumlah perusahaan konstruksi naik dari 129 ribu pada tahun 2015 menjadi 142 ribu pada tahun 2016. Jumlah pekerja tetapnya bertambah dari 975 ribu di tahun 2015 menjadi 999 ribu pekerja di tahun 2016.

Jumlah pekerja harian lepas juga naik secara signifikan. Dari 1.5 juta orang per hari di tahun 2015 menjadi 1.6 juta orang di tahun 2016. Secara otomatis, jumlah balas jasa pekerja tersebut juga

naik dari sebesar Rp129,6 triliun pada 2015 menjadi sebesar Rp140,6 triliun pada 2016. Dari data-data tersebut, sudah dapat dipastikan ekonomi kita masih akan tumbuh. Apalagi data ini baru diambil dari bidang konstruksi saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan, pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati untuk mendukung kesinambungan fiskal. Semua alokasi utang negara juga difokuskan untuk pembangunan. Utang pemerintah hanya akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif dan bermanfaat jangka panjang. Misalnya, pembiayaan infrastruktur dan pembangunan manusia.

Lantas bagaimana dengan bunga dan pokok cicilan utang yang semakin besar setiap tahunnya? Sekali lagi tentu hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Ketika pembangunan infrastruktur didukung oleh kualitas manusia yang baik, maka produksi nasional akan meningkat, pendapatan perusahaan dan rakyat akan meningkat, dan kemampuan negara untuk membayar cicilan juga akan meningkat.

Agar konsep ini berjalan dengan baik, kita semua wajib mengawal pembangunan, terutama terkait integritas para pengelola utang, pengelola infrastruktur, aparat penegak hukum, hingga para pemungut pajak. Semua elemen pemerintahan dan dunia bisnis yang kegiatannya dibiayai dari APBN harus bersih dari korupsi dan gratifikasi. Dengan begitu, pengelolaan utang dapat dilakukan secara tepat. Sebagai contoh, banyak diantara kita yang membangun rumah kontrakan sederhana yang sebagian modalnya berasal dari pinjaman. Aset kita akan bertambah. Saat pinjaman tersebut sudah lunas, kita tinggal menikmati hasilnya saja.

Tentu dalam proses pembangunan ada potensi korupsi dari karyawan yang bekerja. Bisa jadi semennya atau besinya dikurangi sehingga bangunan berisiko gampang roboh. Bisa jadi anggota keluarga pengelola ada yang terjerat narkoba, sehingga utang yang diambil berisiko tinggi gagal bayar.

Begitu pula dengan NKRI. Bila utang

dikelola dengan baik, tidak ada lagi korupsi, dan seluruh aparaturnya dengan baik, maka dapat dipastikan suatu saat nanti utang justru akan menjadikan negara ini kaya raya dengan sendirinya.

Sebab itu, langkah pemerintah untuk membangun manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan narkoba menjadi penting untuk membangun karakter bangsa. Tugas kita adalah turut berpartisipasi dan mengawasi mulai dari tingkat desa.

Penutup

Jika pengelola uang negara mampu mengelola utang dengan tepat dan amanah, modal pinjaman justru akan membantu Indonesia untuk tumbuh lebih cepat. Harapannya, hal ini turut membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki begitu banyak potensi untuk digali dan merupakan lahan investasi yang menjanjikan. Misalnya melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN).

Aturan Perpajakan Pertambangan Mineral, Penerimaan Negara Akan Meningkatkan

Riviu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang memuat kewajiban keuangan baru di sektor pertambangan mineral bagi pemegang izin usaha pertambangan, termasuk aturan untuk perusahaan yang masih memiliki kontrak karya. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP), dan pemegang Kontrak Karya (KK) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (PP 37 Tahun 2018) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Agustus 2018.

Landasan yuridis penerbitan PP 37 Tahun 2018 adalah ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan lain yang menjadi dasar terbitnya aturan ini adalah Pasal 2 dan Pasal

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengaturan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terkait penyesuaian Kontrak Karya (KK) adalah sesuai ketentuan Pasal 169 UU Minerba yang menjamin upaya peningkatan penerimaan negara.

Dalam rangka memperkaya aspek aturan dari aspek perekonomian, energi, lingkungan dan keberlangsungan usaha, Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan PP Nomor 37/2018. Rangkaian pembahasan dilakukan baik dengan internal Pemerintah (antara lain Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemensetneg, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian KLH, dan Kementerian Keuangan) maupun dengan eksternal Pemerintah atau stakeholders terkait yaitu asosiasi usaha pertambangan dan pelaku usaha pertambangan mineral.

Pokok Pengaturan

Pokok-pokok pengaturan dalam PP 37 Tahun 2018 terdiri atas perlakuan pajak penghasilan, kewajiban pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan, perlakuan perpajakan dan atau PNBP bagi pemegang IUPK operasi produksi yang sebelumnya berupa kontrak karya yang belum berakhir kontraknya, maupun hak dan kewajiban perpajakan dan PNBP bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, atau Kontrak Karya.

Ketentuan perpajakan dalam PP 37 Tahun 2018 berlaku untuk objek pajak di bidang usaha pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang usaha pertambangan sehubungan dengan penghasilan dari usaha, penghasilan dari luar usaha, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan usaha tersebut dihitung dengan

menggunakan harga pasar, baik untuk mineral logam, mineral bukan logam, maupun batuan. Perhitungan lain yang diperbolehkan adalah menggunakan harga yang sesungguhnya diterima atau diperoleh penjual. Apabila ada perbedaan harga, maka digunakan harga yang sesungguhnya diterima atau diperoleh penjual dengan selisih tidak lebih dari 3% dari kutipan harga pasar, atau menggunakan harga sesungguhnya diterima atau diperoleh penjual apabila harganya lebih tinggi. Adapun besaran penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya tersebut termasuk sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, pengembangan fasilitas pendidikan, pembinaan olah raga dan infrastruktur sosial. PP 37 tahun 2018 juga mengatur pengeluaran dan atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak yang mengacu pada ketentuan di bidang pajak penghasilan. Adapun aturan terkait kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Aturan yang baru dari PP 37 tahun 2018 adalah ketentuan perpajakan bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya dan IUPK Operasinya diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Ketentuan yang tetap berlaku adalah perlakuan perpajakan dan/atau PNBP berupa Iuran Produksi dan Iuran Tetap dan PNBP di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat pembagian kewajiban PNBP untuk yang menjadi bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat sebesar mendapatkan PNBP sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih dan bagian Pemerintah Daerah sebesar 6% (enam persen). Adapun ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat IUPK Operasi Produksi diterbitkan, dan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan berakhirnya IUPK Operasi Produksi. PNBP untuk pemerintah daerah terbagi untuk pemerintah provinsi 1%, pemerintah kabupaten atau kota penghasil sebesar 2,5%, dan pemerintah kabupaten atau kota lain sebesar 2,5%.

Ketentuan perpajakan dan/atau PNBP berupa PNBP selain yang sudah diatur

di atas, Pajak Penghasilan pemotongan dan pemungutan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya, atau KK dalam rangka kerja sama di bidang Usaha Pertambangan, akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penutup

Kebijakan yang diatur dalam PP 37 tahun 2018 menggabungkan ketentuan perpajakan dan PNBP. Secara umum, ketentuan ini akan meningkatkan penerimaan negara. Ketentuan secara teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan diterbitkannya PP 37 Tahun 2018 ini diharapkan dapat mendukung iklim usaha di bidang pertambangan mineral dan menarik bagi investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan mineral.

Teks Budi Sulistyono dan Biro Hukum Setjen

Berbagi Manfaat Lewat Kopi Nikmat

Banyak orang berpendapat bekerja kantoran dengan penghasilan tetap adalah pilihan hidup yang aman. Pihak lain berkata bahwa berbisnis adalah untuk mereka yang berani mengambil risiko. Lalu bagaimana jika kedua jenis profesi itu digeluti bersamaan?

Senyum empat orang pria itu nampak terus mengembang. Dengan semangat mereka sibuk menghadirkan beberapa gelas kopi dan *pastry* yang nampak sangat menggoda. Keempat pria ini adalah tokoh dibalik terciptanya Kopi Reman. Sebuah kedai kopi yang terdapat di Kantin Dharma Wanita Kompleks Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta. Adalah Machmud Yunus, Muhammad Ihsan, Fairuz Suffee Aziz, dan Irsyad Qomar yang merupakan pemilik dari kopi paling *hits* se-Kemenkeu (Kementerian Keuangan) ini.

"Silakan dinikmati, *lho*. Biar santai juga nanti tanya-tanyanya," sambut Machmud mempersilakan kami. Dengan antusias mereka menjelaskan tentang produk-produk yang mereka tawarkan. Yang paling terkenal pasti ragam jenis minuman yang hampir semua berbahan kopi, meskipun ada yang dari teh dan coklat. Selain minuman, kedai sederhana tapi apik ini juga menyajikan beragam *pastry* sebagai teman minum kopi.

Awalnya Coba-Coba

Kisah keempat pemilik kedai kopi ini berawal dari unit tempat mereka

bekerja, Bagian Kepegawaian Inspektorat Jenderal (ITJEN). Di tahun 2012 Ihsan, Fairuz, dan Qomar mulai karirnya sebagai abdi negara. Mereka bertemu Machmud yang jauh lebih dulu bekerja di sana. Pertemanan itu akrab terjalin dari kebiasaan menghabiskan jam istirahat di pantri. Waktu santai yang diisi obrolan-obrolan hangat itu jadi kesempatan bagi Machmud, untuk menularkan kegemaran minum kopinya.

"Memang saya sih yang awalnya *nyekokin* mereka tentang kopi. Dari situ kami mulai eksperimen membuat beragam seduhan kopi," kenang Machmud. Racikan kopi mereka mengundang rasa penasaran teman-teman di kantor. Semakin lama semakin banyak yang ingin mencobanya. Dari situ mereka semangat mencari tahu lebih banyak seluk beluk kopi.

Hampir tiap warung kopi mereka kunjungi untuk membandingkan rasa yang sesuai dengan selera mereka. Dari sana mereka lebih mengenal beragam karakter kopi. Proses itu membantu mereka menentukan cita rasa yang ingin mereka dapatkan. "Kami waktu itu sampai menganggap minuman terenak itu air putih, saking sudah hampir muak tiap hari minum *macem-macem* kopi!" seru Qomar.

Dukungan Lingkungan

Empat sekawan ini mulanya berniat untuk memulai usaha berjualan kopi dengan membuka *stand* saat *car free day*. Setelah bertukar pikiran lebih matang, mereka mengurungkan niat tersebut. Ide mereka pun bergulir. Mereka meminta

izin atasan untuk berjualan di area Gedung Djuanda II tempat Inspektorat Jenderal berkantor. Tak disangka ternyata atasan mereka mendukung inisiatif tersebut.

"Kami malah disarankan untuk membuka kedai di depan Koperasi ITJEN di *basement* Djuanda II," kenang Ihsan. Awal memulai usaha di sekitar pertengahan 2013 mereka lakukan semuanya sendiri. Jam buka kedai tersebut pun menyesuaikan jam kerja di kantor. "Buka pagi sampai jam 8, waktu jam makan siang dan sore hari sepulang kerja sampai jam 7 malam. Pokoknya tidak mengganggu waktu kerja kami di kantor *lah*," sambungnya.

Selang beberapa waktu kemudian usaha yang mereka rintis semakin menunjukkan respons positif. Pelanggan mereka makin bertambah. Semula hanya dari lingkungan teman-teman sendiri, kemudian menyebar ke seluruh pegawai ITJEN. Rekomendasi dari mulut ke mulut pun berhasil membuat kopi ini makin dikenal oleh para pegawai unit-unit lain.

"Sampai di suatu titik kami sadar bahwa usaha tersebut sudah terlalu besar untuk kami *handle* sendiri. Akhirnya kami memutuskan untuk merekrut pegawai," sahut Fairuz. Langkah tersebut diambil untuk memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan yang ingin memesan Kopi Reman saat jam kantor.

Lambat laun karena animo yang makin banyak tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk menempati sebuah tempat di Kantin Dharma Wanita.



Dari kiri ke kanan: Machmud Yunus, Fairuz Suffee Aziz, Muhammad Ihsan, dan Irsyad Qomar.

Foto Resha Aditya

Menambah Pundi Untuk Berbagi

Banyak orang membuka bisnis sampingan dari profesi utama mereka karena tergiur mendapatkan pendapatan tambahan. Lumrah memang, tapi menurut empat pria ini, harusnya niat awal memulai usaha tak cukup itu saja.

"Sebaik-baiknya bisnis yang kita buka adalah yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain juga!" tegas Mahmud. Pria yang menjadi kakak tertua di antara keempatnya ini bertutur jika melulu materi yang dikejar, niscaya tidak akan pernah tercukupkan. Lain halnya jika keinginan membuka usaha itu dibarengi dengan niat berbagi manfaat. Mereka berempat sangat bersyukur tentang pencapaian yang telah didapat oleh usaha yang mereka rintis bersama.

Kedai kopi sederhana ini kini telah memiliki cabang di sebuah kampus swasta di Jakarta, bekerja sama dengan sebuah toko buku ternama. Kesempatan tersebut digunakan oleh keempat pemilik sebagai ladang menebar manfaat dengan merekrut lebih banyak pegawai. Setidaknya rezeki yang mengalir dari kopi yang dibeli pelanggan tak hanya menambah pemasukan bagi para

pemiliknya, tapi juga menghidupi lebih banyak orang. Mulai dari yang merasakan langsung yaitu para pegawai, hingga ke para petani kopi yang ada di hulu.

"Alasan memilih usaha kopi ini dulu juga karena melihat peluang yang belum tergarap. Kami hadir untuk memenuhi hasrat penikmat kopi di Kemenkeu, menyajikan kopi nikmat dengan harga bersahabat," jelas Ihsan.

Mimpi Bersama Empat Kepala

Empat kepala mengelola sebuah bisnis bersama. Mereka menganggap itu adalah tantangan yang menyenangkan. Keempatnya malah menerima itu sebagai berkah. Ide yang dihasilkan bisa lebih berwarna karena banyak pemikiran yang dibagi bersama.

"Yang punya ide, langsung *praktekin aja*. Tidak ada salah dan benar. Kami jadikan semua itu pembelajaran!" seru Machmud disambut anggukan kepala ketiga rekannya. Dengan sistem *trial and error* tersebut mereka makin tahu kelemahan dan kekuatan *brand* mereka. Itu membantu keempatnya untuk menyusun strategi bisnis untuk

mengembangkan usaha mereka.

Namun diakui mereka bahwa perlu pembagian kerja tim yang jelas supaya tahu pertanggungjawaban perbagiannya. Machmud sebagai yang paling paham seluk beluk kopi didapuk mengelola operasional, termasuk melakukan *research & development* dan *quality control*. Fairuz dipercaya untuk melakukan pembelian barang-barang yang dibutuhkan. Ihsan yang dianggap luwes bersosialisasi dan komunikasi memegang bagian *marketing*. Sementara Qomar yang paling teliti dipercaya mengelola keuangan.

Mimpi para pemilik Kopi Reman ini cukup sederhana. Mereka hanya berharap jika usaha mereka dapat tumbuh makin besar, hendaknya makin banyak memberi manfaat bagi sekitar. Walau tumbuh perlahan, produk mereka dapat terus dinikmati pelanggan dan terus berkembang. Seperti sebuah doa yang awalnya dilontarkan Bang Pei, seorang *office boy* di kantor mereka, dan kini dijadikan *tagline* Kopi Reman: "Semoga berkesinambungan!".

Teks Dimach Putra

Mabuk Gawai

Ini adalah kali kedua, saat sedang memimpin rapat, saya meminta kepada para peserta untuk menaruh telepon genggam mereka di atas meja. Secara sukarela, para peserta rapat memenuhi permintaan ini. Saya menjanjikan bahwa rapat diupayakan berjalan seefektif mungkin.

Ada maksud di balik permintaan saya tersebut. Tujuannya agar saat rapat, fokus mereka tidak terpecah dengan apa yang ada di layar telepon genggam masing-masing. Hal ini saya lakukan, guna menghindari perilaku *phubbing*. Istilah yang sedang tren saat ini.

Apa itu *Phubbing*? *Phubbing* adalah kependekan dari *phone snubbing*, didefinisikan sebagai perilaku pengabaian kepada lawan bicara dengan selalu melihat telepon genggam. Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum lama ini, menerjemahkannya sebagai mabuk gawai.

Menurut beberapa ahli, perilaku ini mulai ditemukan pada 2010, saat telepon genggam cerdas mulai marak, serta banyaknya aplikasi melenakan yang terinstalasi di dalamnya. Pada Mei 2012

dibuat neologisme untuk menggambarkan perilaku tersebut.

Penelitian baru dari University of Kent, Inggris menyatakan *phubbing* secara negatif mempengaruhi hubungan orang-orang. Sebab, pengabaian itu mengancam kebutuhan dasar untuk menjadi bagian dari lingkungan.

Di luar rapat, perilaku *phubbing* menjadi sebuah ketidaksopanan. Apatah lagi ketika berada di dalam rapat. Saya pernah melihat seorang pejabat sedang memimpin rapat. Ia menyadari banyaknya peserta rapat yang matanya terpaku ke layar telepon genggamnya masing-masing. Maka, ia mencari mata yang masih menatap dan serius mendengarkannya. Ternyata, jumlahnya sedikit. Hal ini tentu memprihatinkan.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan pada 2016, kehadiran telepon genggam dapat menghambat aliran bebas percakapan. Ketika telepon hadir dalam percakapan yang sedang terjadi, percakapan menjadi kurang memuaskan. Selanjutnya, perasaan empati menjadi merosot.

Saya teringat akan eksperimen beras yang ada di dalam buku *The Hidden*

Messages in Water yang ditulis oleh Masaru Emoto. Beras diletakkan dalam tiga botol. Beras pertama diucapkan kata “terima kasih” setiap hari selama sebulan. Botol kedua diberi ucapan “kamu bodoh” selama periode yang sama. Sementara botol ketiga didiamkan begitu saja.

Hasilnya, beras pada botol pertama mulai terfermentasi, tetapi masih tercium aroma lembutnya. Beras di botol kedua membusuk dan menjadi hitam. Namun, siapa sangka beras di botol ketiga lebih cepat membusuknya dibandingkan botol kedua. Ternyata, daya rusak pengabaian begitu cepat dan dahsyat.

Namun, penelitian lain mewartakan bahwa *phubbing* adalah sebuah kenormalan baru. Hal ini terjadi karena objek yang diteliti itu adalah mereka yang menerima perilaku *phubbing* dengan mudah. Meski demikian, kutipan ini pantas untuk direnungkan. Jika Anda *phubbing*, maka bersiaplah untuk di-*phubbing* sebagai balasannya. Anda tidak menghendakinya, bukan?

Teks Riza Almanfaluthi

Digital ParentThink



Judul :
Digital Parentthink : Tips
Mengasuh Kids Zaman
Now
Pengarang :
Mona Ratuliu
Penerbit :
Noura Books
Kota Terbit :
Jakarta
Tahun Terbit :
Juli 2018
Deskripsi Fisik :
199 halaman
ISBN :
978602385513

Banyak yang mengeluhkan kids zaman now tulisan tangannya kurang rapi, mengalami kesulitan pada pengaturan keseimbangan tubuh, berat badan anak berlebihan bahkan cenderung obesitas, hingga sederet masalah perkembangan moral, sosial, gender, bahasa, neurologi, sampai aspek kognitif kemampuan pola pikir kritis dan logika berpikir. Apakah kita menyadari perubahan perilaku anak ketika seharian penuh bahkan sampai bertahun-tahun asyik dengan perangkat gadgetnya?

Melalui digital parentthink, Mona Ratuliu berbagi pengalamannya mengasuh anak-anak Generasi Net dengan memanfaatkan internet dan media sosial secara bijaksana. Selain contoh, tips dan trik, serta pendapat para pakar, Mona juga menyertakan kisah sukses anak-anak yang bisa memanfaatkan internet secara positif. Banyak kisah-kisah inspiratif yang datang dari generasi Z yang akrab dengan teknologi. Mereka terbilang sukses, karena bisa menggunakan *gadget* dengan bijak asalkan mendapatkan dukungan dan pendampingan yang tepat.

Gadget memang diciptakan dengan manfaat luar biasa dan berfungsi untuk memperbaiki kualitas hidup orang banyak. Penulis mengajak para orang tua untuk menanyakan kembali pada diri kita masing-masing apakah kita merasa aman kalau memberikan gadget pada anak-anak? Mengingat benda tersebut memiliki efek yang tidak kalah mengerikannya dibandingkan dengan pisau.

Jika orang tua memperkenalkan gadget semenjak dini tidaklah salah. Asalkan, tujuannya hanya untuk memperkenalkan kecanggihan teknologi pada anak. Bahasa lainnya, agar anak tidak gaptek dan “melek teknologi”. Saat dewasa nanti mereka akan hidup berdampingan dengan teknologi. Misalnya, menggunakan gadget sebagai sarana pembelajaran yang mudah bagi anak. Dengan menggunakan gadget, orangtua bisa menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan anak dengan mudah. Atau, memanfaatkan *gadget* sebagai alat komunikasi untuk melepas rindu dengan kerabat yang tinggal berjauhan.

Penulis mengingatkan orangtua untuk tidak bisa terus-menerus melindungi anak-anak dari tantangan zaman. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi sambil terus membimbing mereka agar bisa melindungi dirinya sendiri. Ini yang membedakan kita dengan orangtua zaman dulu. Orangtua zaman dulu mungkin *enggak* perlu belajar parenting kayak orangtua zaman sekarang. Namun, kondisi

perkembangan zaman yang kian pesat ini menuntut kita untuk terus-menerus belajar menjadi orangtua yang selalu bisa mendampingi anak dalam kondisi apa pun. Menuntut kita untuk terus membaca buku, mencari informasi lewat internet sampai mengikuti kelas-kelas *parenting* agar terus memiliki informasi terbaru mengenai cara membimbing anak-anak kita. Supaya lewat kita, anak-anak menghadapi perkembangan dunia dengan jiwa yang tangguh. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa.

Membaca buku ini tidak perlu runut satu persatu, pembaca dapat memilih halaman mana yang akan di baca. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau membaca dari halaman awal, karena menariknya setiap teori dari pakar diselipkan tabel khusus testimoni dari para orang tua yg memiliki cerita yg sama dengan apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam pola pengasuhan anak.

Tambahan karakter pada setiap halaman membantu pembaca merepresentasikan maksud dari Penulis. Selain itu, sampul buku yang dominan wajah Penulis menguatkan sosok Mona Ratuliu yang dikenal banyak masyarakat Indonesia sebagai artis, penulis buku, dan narasumber di media, serta berbagai seminar terkait Parenting.

Selamat mendampingi anak-anak tumbuh dan berkembang di era digital. Yakinlah akan hal baik yang akan terjadi pada anak-anak kita. Tentunya, kesuksesan mereka juga tak lepas dari bimbingan kita sebagai orang tua untuk mengarahkan penggunaan teknologi dengan baik dan benar. Selamat membaca!

Peresensi: Krishna Panu Pradana



Foto
Anas Nur
Huda

Terpikat Pesona Teluk Buyat



Subuh itu alarm di gawai saya berbunyi nyaring. Sembari menahan kantuk saya pun bergegas menyiapkan perbekalan secukupnya. Tak ingin melewatkan matahari terbit, saya segera keluar untuk mendaki bukit tak jauh dari pondok tempat saya bermalam.

Bukit Harapan yang terletak di Ratatotok, Minahasa Tenggara ini adalah lokasi terbaik untuk menikmati panorama Teluk Buyat. Kala mentari perlahan muncul dari cakrawala, air laut tenang

tak bergelombang. Dari gardu pandang di puncak bukit, saya dapat melihat sekelompok nelayan pulang melaut, deretan rumah warga pesisir, serta keseluruhan garis pantai. Di balik teluk nampak deretan bukit memanjang dengan pulau-pulau kecil terhampar.

Di salah satu sisi teluk ada pantai yang menarik perhatian saya. Pantai Lakban namanya. Pantai ini mulai dikembangkan pada awal tahun 2000. Deretan nyiur memagari bibir pantai, sejajar dengan hutan bakau di sepanjang

Nelayan hendak menepi di pesisir Teluk Buyat kala pagi.



Berburu sunrise di Pulau Harapan.

Pesona bawah laut Teluk Buyat.

Proses mengasap ikan deho secara tradisional.

aliran sungai yang bermuara ke pantai.

Berbeda dengan Bunaken yang sudah sangat ramai, wisata bawah laut Teluk Buyat belum banyak dikenal. Namun, kondisi terumbu karang di teluk ini tak kalah menawan. Saya berkenalan dengan Pak Jeri, seorang penyelam senior yang tengah mengawasi konservasi di lingkungan sekitar. Ketika dia mengajak menyelam, tanpa pikir panjang saya menerima tawarannya.

Perahu motor yang kami tumpangi melawan ombak menuju area Pulau Batu Tiga. Lokasi ini menjadi titik selam pertama kami. Dipandu Pak Jeri, saya melompat ke dalam air. Perlahan kami turun ke kedalaman sepuluh meter.

Siang itu cuaca cerah. Sinar matahari yang masuk membuat jarak pandang saya cukup jauh. Titik selam ini hampir seluruhnya tertutup terumbu karang yang dipenuhi gerombolan ikan warna warni.

Bisa dibilang alam bawah laut Teluk Buyat adalah salah satu yang terbaik di Sulawesi Utara. Setidaknya ada lebih dari dua puluh lokasi menyelam lain seperti Pulau Dakokayu, Pulau Hogow, Pulau Putus-Putus, dan Pulau Naga.

Keindahan bawah laut Teluk Buyat juga dapat dinikmati dengan *snorkeling*. Terumbu karang yang tumbuh subur di area ini antara lain dari jenis *acropora*, *montipora*, serta beragam karang lunak dan keras.

Tak hanya keindahan laut, Teluk Buyat juga memiliki

pesona hutan lindung. Semula, lokasi ini adalah area penambangan emas yang dikelola oleh sebuah perusahaan multinasional. Setelah izin penambangan berakhir, area bekas tambang direhabilitasi dan ditanami kembali. Kini, kawasan ini sudah diresmikan menjadi hutan raya. Selain berfungsi sebagai hutan lindung, kawasan ini juga menjadi lokasi penelitian.

Menjelang senja, saya menikmati waktu dengan berjalan kaki menyusuri perkampungan sekitar. Langkah saya terhenti begitu melihat seorang pria paruh baya tengah mengasapi ikan deho di pekarangan rumahnya. Deho adalah sebutan lokal untuk tongkol berukuran kecil.

Metode pengasapannya sederhana saja. Sabut dan tempurung kelapa dibakar hingga menghasilkan asap putih pekat. Puluhan ikan deho segar yang sudah dibersihkan ditata berjajar di atas bara. Setiap beberapa menit, ikan dibalik agar tidak ada sisi yang gosong.

Didorong rasa lapar sekaligus penasaran, saya membeli beberapa ikan deho. Ikan asap ini disajikan bersama sambal dabu-dabu sebagai pelengkap. Gurih dan lembutnya daging ikan deho terasa sangat sedap ketika beradu dengan pedas dan segarnya dabu-dabu. Pemandangan para nelayan yang bersiap hendak melaut menjadi penutup kunjungan saya di Teluk Buyat.

Teks dan foto Adhi Kurniawan

Surya Putra Sahetapy Mengenalkan Bahasa Isyarat



Surya Putra Sahetapy.

Foto
instagram.com/
suryasahetapy

Bahasa penting bagi manusia untuk mengekspresikan pikiran sehingga bisa saling memahami. Tak luput pula bagi manusia yang memiliki keterbatasan berkomunikasi seperti Tuli. Mereka pun sangat mementingkan bahasa isyarat sebagai bahasa berkomunikasi sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, masyarakat yang lainnya perlu mengetahui bahasa isyarat agar bisa membantu dan menghargai Tuli. Salah satu penggerak gerakan memasyarakatkan bahasa isyarat itu adalah Surya Putra Sahetapy.

Mengutip dari Adhi Bharoto LBI UI bahwa bahasa isyarat merupakan sebuah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tuli untuk berkomunikasi. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan alat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan perasaan. Bahasa isyarat bukan merupakan representasi bahasa lisan semata. Hal ini karena bahasa isyarat sendiri memiliki struktur linguistiknya sendiri seperti halnya bahasa lain.

Putra ketiga dari aktor Ray Sahetapy dan Dewi Yuli tersebut memang tak bisa mendengar sejak kecil, namun hal itu bukan menjadi penghalang untuk mendulang prestasi. Surya bersama dengan tujuh pemimpin komunitas Tuli dari berbagai daerah mewakili komunitas Tuli Indonesia untuk ikut dalam program pertukaran pelajar kedutaan besar Amerika di Indonesia yang bernama Dr. Mason Global. Tujuan program tersebut adalah meningkatkan kesadaran agar masyarakat Indonesia menghargai komunitas Tuli dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemberian kesempatan dalam pembangunan Indonesia melalui akses pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

“Yang perlu diperbaiki adalah stigma masyarakat terhadap disabilitas, khususnya komunitas Tuli dimana mereka memiliki identitas, linguistik sendiri, yaitu

bahasa isyarat dan budaya Tuli. Kemudian pentingnya kualitas pendidikan untuk Tuli dalam akses Bahasa Isyarat sehingga membantu komunitas Tuli untuk mengakses kehidupan termasuk mengakses bahasa Indonesia tulisan,” urainya kepada Media Keuangan.

Di sisi lain, Surya juga aktif sebagai selebgram dan *influencer*. Hal itu berasal dari kebiasaan masa kecilnya yang gemar membaca cerita-cerita inspiratif, seperti cerita Thomas Alva Edison, Helen Keller, dan lain-lain. Selain itu, para aktivis Tuli dunia pun aktif mensosialisasikan konten bahasa isyarat melalui media sosial mereka. Oleh karena itu, ia pun terinspirasi untuk membuat konten yang berbeda.

Lebih jauh, menurutnya, terkait dengan sebutan Tuli merupakan sebutan yang tepat baginya. Seiring waktu berjalan teknologi semakin mudah dan beberapa masyarakat mulai

mengerti tentang terminologi Tuli. “Sebelumnya masyarakat awam berpikir bahwa tunarungu merupakan istilah pas untuk menyebutkan bagi kami. Tetapi bagi kami, istilah tersebut tidak pas dan tidak sesuai dengan identitas kami,” urainya.

Tuli merupakan pandangan sosial dimana suatu kelompok memiliki identitas, budaya dan komunitas yang menggunakan bahasa isyarat dan menganggap hilangnya fungsi pendengaran bukan masalah. Sedangkan tunarungu merupakan istilah medis dimana hilangnya pendengaran merupakan masalah, maka harus diperbaiki agar bisa menjadi orang dengar (bukan normal). Oleh karena itu, kami lebih memilih sebagai Tuli. Masalah kami bukan pendengaran kami, melainkan bagaimana mengajak masyarakat umum untuk memahami kami.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim



Cerita dan Gambar: Bimo Adhi





HARI KERETA API NASIONAL
28 SEPTEMBER 2018

Foto
Resha Aditya Pratama



KEMENTERIAN KEUANGAN